

DISERTASI

SEKOLAH PEREMPUAN

**SUATU STUDI KOMUNIKASI ADVOKASI PENDIDIKAN NON-FORMAL
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DI KEPULAUAN SPERMONDE**

**MUHAMMAD ILHAM
E0331722001**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SEKOLAH PEREMPUAN
SUATU STUDI KOMUNIKASI ADVOKASI PENDIDIKAN NON-FORMAL
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DI KEPULAUAN SPERMONDE

DISERTASI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat mencapai gelar Doktor

Disusun dan Diajukan Oleh

MUHAMMAD ILHAM
E0331722001

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**SEKOLAH PEREMPUAN : SUATU STUDI KOMUNIKASI ADVOKASI
PENDIDIKAN NON FORMAL DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KEPULAUAN SPERMONDE**

Disusun dan diajukan oleh

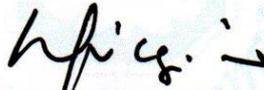
MUHAMMAD ILHAM

E03311722001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 08 Juni 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Promotor,



Prof. Dr. H. Hafied Cangara, M.Sc.
NIP 195204121976031017

Co. Promotor,



Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU.
NIP 194809131978031001

Ketua Program Studi
Ilmu Komunikasi,



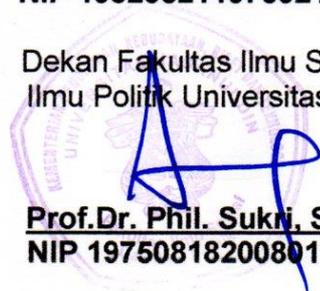
Dr. H. Muhammad Farid, M.Si.
NIP 196107161987021001

Co. Promotor,



Prof. Asfah Rahman, M.Ed., Ph.D.
NIP 195205211976021001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.
NIP 197508182008011008

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : **Muhammad Ilham**

Nim : **E0331722001**

Program Studi : **Ilmu Komunikasi**

Jenjang : **S3**

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

“SEKOLAH PEREMPUAN”

**Suatu Studi Komunikasi Advokasi Pendidikan Non-Formal dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kepulauan Spermonde**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Disertasi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar 08 Juni 2023

Yang menyatakan



Muhammad Ilham

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Dengar menyebut nama Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah yang telah melebihkan manusia dengan ilmu dan amal atas semesta alam. Tak terkira rasa Syukur saya yang telah menyelesaikan disertasi yang berjudul : "Sekolah Perempuan" Suatu Studi Komunikasi Advokasi Pendidikan Non-Formal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kepulauan Spermonde.

Rasanya sulit mengungkapkan perasaan saya saat ini. Hanya ucapan Alhamdulillah rabbilalamin dan ungkapan rasa terima yang tak terhingga yang dapat saya sampaikan kepada kedua orang tua saya, terima kasih tak tertingga atas setiap detik perhatian yang telah diberikan. Ada doa yang tak pernah putus dan kecintaan yang paling utama yang saya dapatkan dari Bapak dan Ibu (H.Alwi dan Alm. Tewi), begitu saya biasa memanggil mereka berdua. Keberhasilan hari ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, istri saya tercinta dan anak-anak saya. Semoga kelak anak-anak saya bisa jauh lebih sukses pencapaiannya.

Kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, mengarahkan, mendukung, memotivasi dan mendoakan saya sehingga pada akhirnya saya dapat mencapai titik akhir dari keberhasilan studi program doctor saya di Universitas Hasanuddin. Ucapan rasa Syukur dan terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M. Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Prof. Dr. H. Hafied Cangara, M. Sc selaku Promotor

3. Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, S.U selaku Co. Promotor 1 dan Prof. Asfah Rahman, M.Ed. Ph.D, selaku Co. Promotor 2
4. Prof.Dr. H.Abd.Rasyid Masri M.Pd.M.Si.M.M, dari Universitas Alauddin Makassar selaku penguji eksternal
5. Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M. Si, Prof.Nurul Ilmi Idrus, Ph. D, Dr.Ir.Andi Tamsil, MS, tim penguji
6. Prof. Dr. Phil, Sukri, S.lp. M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
7. Dr. H.Muhammad Farid, M.Si selaku Ketua Prodi Doktor Studi Ilmu Komunikasi.

Semoga Allah Swt melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya atas kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Semoga ilmu yang saya peroleh selama menempuh S3 ID Universitas Hasanuddin dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kemaslahatan ummat. Karena dengan ilmu seseorang dapat mengubah Tindakan menjadi sebuah amal. Tanpa ilmu basi jadi Tindakan hanya suatu aktivitas tak bermilai.

Demikian kata pengantar disertasi ini saya buat, semoga bermanfaat.

Wassalamualaikum wr.wb

Makassar, 7 Juni 2023

Penulis,

Muhammad Ilham

ABSTRAK

MUHAMMAD ILHAM. Sekolah Perempuan: Suatu Studi Komunikasi Advokasi Pendidikan Non-Formal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kepulauan Spermonde (dibimbing oleh **Hafied Cangara, Tahir Kasnawi, Asfah Rahman**).

Penelitian ini bertujuan untuk.: 1) Mendeskripsikan Tata Kelola Sekolah Perempuan dalam mengembangkan potensi keterampilannya guna meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. 2) Mengungkapkan proses komunikasi advokasi yang dilakukan oleh pendamping dan peserta pada sekolah perempuan di Kepulauan Spermonde. 3) Mendeskripsikan tantangan yang dihadapi sekolah perempuan dalam pelaksanaan komunikasi advokasi. 4) Mendeskripsikan capaian yang diperoleh sekolah perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kepulauan Spermonde.

Penelitian ini juga bersifat kolaboratif, dimana peneliti melibatkan partisipan sebagai kolaborator aktif dalam penelitian. Isu pokok yang menjadi kajian ini adalah cara sekolah perempuan dalam membangun komunikasi dengan berbagai pihak yang diawali dengan penggalian informasi, melakukan advokasi dan keberhasilan mereka secara umum dalam meningkatkan kesejahteraan peserta sekolah perempuan dan kaum perempuan Kepulauan Spermonde secara umum serta dampaknya terhadap masyarakat sekitarnya. Kegiatan komunikasi advokasi sekolah perempuan juga dikaji mengenai kegiatan lembaga yang menjadi inisiator program *gender watch* (awal kegiatan Sekolah Perempuan) yaitu Institut Kapal Perempuan Jakarta dan YKPM Sulawesi Selatan sebagai pelaksana. Peneliti menggali informasi tentang kegiatan mereka menyangkut komunikasi dengan pemerintah daerah Kepulauan Spermonde, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara dan ketiga desa yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan Sekolah Perempuan.

Hasil penelitian adalah tata kelola Sekolah Perempuan di Kepulauan Spermonde masih dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarki yang berdampak pada kehidupan kaum perempuan. Komunikasi advokasi Sekolah Perempuan yang dilaksanakan di Kepulauan Spermonde menitikberatkan pada usaha perubahan bagi perempuan pulau dalam berbagai aspek kesadaran, komitmen, politik, dan budaya yang diimplementasikan pada tiga komponen yaitu penggunaan metode, teknik penyampaian materi dan penggunaan media. Tantangan yang dihadapi Sekolah Perempuan dalam pelaksanaan komunikasi advokasi terutama menyangkut pembiayaan bahwa kondisi peserta Sekolah Perempuan yang sebagian besar adalah kelompok *grassroot* atau rentan tentunya memiliki kehidupan ekonomi yang lemah, sehingga waktu dan kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan disesuaikan dengan kesempatan mereka serta diberikan biaya adalah merupakan hal luar biaya bagi mereka. Kegiatan ini menjadi saluran bagi peserta sekolah untuk bertemu dan berdiskusi dengan para pemangku kebijakan, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, media, anggota dewan dan lainnya yang secara tidak langsung menguat posisi mereka di tengah masyarakat.

Kata kunci: komunikasi advokasi, Sekolah Perempuan, Kepulauan Spermonde

ABSTRACT

MUHAMMAD ILHAM. Women's School: A study of non-formal education advocacy communication in improving family welfare in the Spermonde Islands. (supervised by: **Hafied Cangara, Tahir Kasnawi, Asfah Rahman**)

This study aims to: 1. Describe the management of women's schools in developing their skills to improve the welfare of their families. 2. Disclose the process of advocacy communication carried out by facilitators and participants at women's schools in the Spermonde Islands. 3. Describe the challenges faced by women's schools in implementing advocacy communication. 4. Describe the achievements of women's schools in improving family welfare in the Spermonde Islands.

This type of research is also collaborative in nature where research involves participants as active collaborators in research. The main issue in study is the way women's schools build communication with various parties, starting with gathering information, advocating and their general success in proving the welfare of female school participants and women of Spermonde Islands a general and their impact on the surrounding community. Advocacy communication activities for women's schools were also examined regarding the activities of the institutions that were the initiators of the gender wachth program (the start of women's school activities) namely the Institut Kapal Perempuan Jakarta and YKPM South Sulawesi as executors, the research sought information about their activities regarding communication with the local government of the Spermonde Islands, Liukang Tupabbiring Utara sub-district and the three villages where the women's school activities were held.

The result of the research is that the management of women's school in the Spermonde Islands is still influenced by the strong patriarchal culture which has an impact on the lives of women, the advocacy communication for women's school implemented in the Spermonde Islands focuses on efforts to change for island women in various aspects of awareness, commitment, politics, and culture which are implemented in three components, namely the use of methods, material delivery techniques, and use of media. The challenges faced by women's schools in implementing advocacy communication are mainly related to financing. The condition of female school participants, most of whom are grassroots or vulnerable groups, of course, have weak economic life, so that their and opportunities to obtain education are adjusted to their opportunities and gives funding, out of pocket for them. This activity is a channel for school participants to meet and discuss with policy makers, academics, community leaders, religious leaders, the media, counilors and others who indirectly strengthen their position in society.

Keywords: *advocacy communication, women's school, Spermonde Islands*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Masalah	21
1.3 Rumusan Masalah	22
1.4 Tujuan Penelitian	23
1.5 Kegunaan Penelitian	23
1.5.1. Secara Teoritis (Bagi Pengembangan Ilmu)	24
1.5.2. Secara Praktis (Bagi Penerapan Ilmu)	24
1.5.3. Nilai Kebaruan Penelitian	25
1.6 Signifikansi Penelitian	26

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu	28
2.1.1 Komunikasi dan Partisipasi	28
2.1.2 Gender dan Kemiskinan	38
2.1.3 Pembangunan Dan Pendidikan Perempuan	46
2.1.4 Perempuan dan Keluarga	54
2.1.5 Komunikasi Advokasi Sebagai Pendampingan Program	58
2.2 Pendekatan Teoritis	84
2.2.1 Teori Persuasif	84
2.2.2 Teori Komunikasi Feminis	89
2.2.3 Teori Pemberdayaan	92
2.3 Kerangka Konsep	97
2.4 Asumsi-Asumsi Dasar	98

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	99
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian	99
3.3 Kerangka Penelitian	100
3.4 Informan Penelitian	103

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	107
3.6 Teknik Analisa Data.....	112
3.7 Etika Penelitian	113

BAB 4 GAMBARAN LOKASI DAN OBYEK PENELITIAN

4.1 Kepulauan Spermonde	115
4.1.1 Kependudukan dan Demografi.	117
4.1.2 Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Budaya	118
4.1.3 Layanan Kesehatan	121
4.1.4 Kepala Rumah Tangga Perempuan.....	122
4.2 Sekolah Perempuan	123
4.2.1 Mengapa Dibutuhkan Sekolah Perempuan.....	126
4.2.2 Sekolah Perempuan di Indonesia	127
4.2.3 Sekolah Perempuan Kepulauan Spermonde.....	128
4.3 Tata Kelola Sekolah Perempuan	130
4.3.1 Metode.....	130
4.3.2 Sekolah Perempuan Komunitas.....	134
4.3.3 Tahapan	135
4.3.4 Kurikulum	136
4.3.5 Peserta Sekolah Perempuan.....	139
4.3.6 Nara Sumber /Fasilitator Sekolah Perempuan.....	141
4.3.7 Organisasi Penyelenggaraan	143

BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian	147
5.1.1 Pembentukan dan Perkembangan Komunikasi Advokasi Sekolah Perempuan Spermonde	147
5.1.2 Penyelenggaraan Komunikasi Advokasi	157
5.1.3 Komunikasi Advokasi Sekolah Perempuan Berbasis Data.....	158
5.1.4 Pendidikan Non-Formal Komunikasi Advokasi	165
5.1.5 Integral Pelaksanaan Komunikasi Advokasi Sekolah Perempuan	180
5.1.6 Metode Komunikasi Advokasi	185
5.1.7 Penyampaian Materi Komunikasi Advokasi.....	191
5.1.8 Media Komunikasi Advokasi.....	196
5.2 Analisis Atau Pembahasan	197
5.2.1 Tantangan Sekolah Perempuan Pulau.....	197
5.2.2 Dampak Sekolah Perempuan	200
5.2.3 Dampak Terhadap Masyarakat Sekolah	203
5.2.4 Bebas Ganda Perempuan Pulau	203
5.3 Capaian Sekolah Perempuan Pulau.....	217
5.3.1 Partisipasi, Agen dan Pemimpin dari Sekolah perempuan	217
5.3.2 Model Komunikasi Advokasi Sekolah Perempuan	222

BAB 6 SIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Simpulan	235
6.2 Rekomendasi	238
6.2 Implikasi Teoretik	239

DAFTAR PUSTAKA	242
-----------------------------	-----

Lampiran – Lampiran

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Model Keberlanjutan Organisasi Berbasis Partisipasi	31
Gambar 1.2 Kekuatan Partisipasi Dengan <i>stakeholder</i>	33
Gambar 1.3 Pemberdayaan untuk Pendidikan Perempuan dan Anak Perempuan	51
Gambar 1.4 <i>The Basic Element of Advocacy</i>	66
Gambar 1.5 Proses Advokasi	67
Gambar 1.6 Hubungan Antar Sumber Daya, Agensi, dan Hasil dalam Pemberdayaan	95
Gambar 1.7 Kerangka Konsep	98
Gambar 1.8 Triangulasi Sumber Data.....	111
Gambar 1.9 Triangulasi Pengumpulan Data	111
Gambar 1.10 Analisa Data	113
Gambar 1.11 Kepulauan Spermonde	116
Gambar 1.12 Alur Materi Sekolah Perempuan	138
Gambar 1.13 Model Pengembangan Pendidikan Kritis Sekolah Perempuan.	176
Gambar 1.14 Model Komunikasi Advokasi Sekolah Perempuan.....	233

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Karakteristik Riset	103
Tabel 2. Pulau, Kelompok Dan Peran	106
Tabel 3. Sumber: BPS Pangkep: Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara dalam Angka 2019	118
Tabel 4 <i>Database</i> Perekrutan Awal Sekolah Perempuan Pulau	140
Tabel 5 Sumber Data: Program <i>Gender Watch</i> , Sekolah Perempuan	145
Tabel 6. Perbandingan Data Lembaga dan Data Alternatif Sekolah Perempuan.....	162
Tabel 7 Proses Pembelajaran	167
Tabel 8. Sumber: Pesan,Saluran/Media, Penerima, <i>Feedback</i>	223

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada dasarnya adalah usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks global, dunia menyadari bahwa di dalam memasuki abad 21, program pembangunan tidak bisa dilakukan oleh setiap negara dengan kebijakan masing-masing. Diperlukan upaya global untuk bekerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan mitra lainnya sebagaimana diamanahkan oleh PBB melalui *United Nation Development Program (UNDP)* agar setiap negara menyukseskan pembangunan, mulai dari program *MDGs (Millennium Development goal)* yang ditandatangani oleh 189 kepala negara dan perwakilan anggota PBB di Markas PBB di New York (AS) pada September 2000 untuk jangka waktu 15 tahun ke depan (2000-2015).

Dalam pertemuan tersebut, semua negara berkomitmen untuk mengintegrasikan *MDGs* sebagai bagian dari program pembangunan nasionalnya dalam upaya menangani penyelesaian isu-isu yang sangat mendasar tentang pembangunan manusia dalam paket arah pembangunan global. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015 melalui 8 program utama, yakni sebagai berikut: (a) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, (b) Mencapai pendidikan dasar untuk semua, (c) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (d) Menurunkan angka kematian anak, (e) Meningkatkan kesehatan ibu, (f) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit

menular lainnya, (g) Memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan (h) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Setelah melaksanakan program pembangunan global ini selama kurun waktu 2000 – 2015, Pemerintah Indonesia mengakui ada beberapa program yang kurang berhasil dalam pelaksanaannya, terutama penurunan angka kematian bayi (*MDG 4*) dan penurunan angka kematian ibu (*MDG 5*) karena target yang ditetapkan sulit terlaksana (Utari,A.1:2013).

Menjelang berakhirnya pelaksanaan program-program *MDGs*, PBB melakukan konferensi di Rio de Janeiro, Brasil untuk membahas soal “*ekonomi hijau*” termasuk makanan, air, energi, kota, pekerjaan, lautan, dan bencana yang dibingkai dalam gagasan pembangunan manusia yang inklusif, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Namun, ketika Rio+20 berakhir, kerangka kerja ini diubah dan konsensus yang dicapai dalam konferensi tampaknya memiliki cakupan yang lebih luas. Rio+20 juga meluncurkan kemajuan yang akan mengarah pada tinjauan pada 2015 tentang *MDGs* yang diadopsi pada tahun 2000. Agenda ini dikenal sebagai agenda pembangunan pasca 2015 atau lebih dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau pembangunan yang berkelanjutan (Cangara, H. 453-455:2020).

Dengan mengacu pada hasil konferensi PBB di Rio de Janeiro ini, pada pertemuan tingkat tinggi di markas PBB pada September 2015, sebanyak 193 negara anggota PBB sepakat untuk menjadikan *SDGs* sebagai kerangka agenda pembangunan dan kebijakan politis selama 15 tahun ke depan mulai 2016 hingga 2030. Pemerintah di setiap negara anggota PBB—baik negara kaya, menengah,

maupun miskin, baik negara maju maupun berkembang—memiliki tanggung jawab mengimplementasikan program *SDGs*. Untuk itu, pemerintah dari semua negara diminta menerapkan agenda dan kebijakan politis pembangunan ekonomi nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan sekaligus melindungi planet bumi (Cangara, H. 453-455:2020).

Kerangka kerja *SDGs* yang baru diuntungkan dari pengalaman luas yang diperoleh dari implementasi *MDGs*, dan juga membawa hal-hal tersisa dari *MDGs* yang belum tercapai, misalnya urbanisasi dan kesetaraan gender (*gender equality*). Beberapa indikator kesetaraan gender menunjukkan adanya masalah, khususnya bagi kaum perempuan, seperti masalah sunat perempuan dan pernikahan dini yang jumlahnya masih tinggi. Selain itu, akar dari ketidaksetaraan gender, seperti diskriminasi hukum, norma dan sikap sosial yang tidak adil, pengambilan keputusan tentang masalah-masalah reproduksi dan rendahnya tingkat partisipasi politik, akan menghambat tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tujuan ke lima.

Data terbaru dari 106 negara menunjukkan bahwa 18 persen perempuan dan gadis yang pernah berpasangan yang berusia 15 hingga 49 tahun pernah mengalami kekerasan pasangan fisik dan/atau seksual dalam 12 bulan sebelumnya. Menurut data di sekitar 90 negara, perempuan mencurahkan rata-rata sekitar tiga kali lebih banyak dalam waktu sehari untuk perawatan dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar, terbatas waktu yang tersedia untuk pekerjaan berbayar, minimnya tingkat pendidikan dan rendahnya derajat kesehatan yang semakin memperkuat kerugian sosial ekonomi berbasis gender (Secretary General UN.11-

12:2019).

Untuk Indonesia, isu-isu mengenai perempuan terutama yang berada di akar rumput (*grassroot*) masih menunjukkan hal kurang menggembirakan. Masalah kekerasan terhadap perempuan semakin kompleks dan beragam, dengan intensitas yang meningkat, terjadi di lintas ruang, baik di ranah domestik, publik dan negara, dengan jumlah kasus 406.178 kasus sepanjang tahun 2018 (Komnas Perempuan.103:2019).

Selanjutnya angka pernikahan dibawah umur yang menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat terdapat 1.348.866 anak perempuan telah menikah di bawah usia 18 tahun pada 2018. Setiap tahun sekitar 300.000 anak perempuan di Indonesia menikah dibawah usia 16 tahun(Widiyarti,Y.1-4:2019) bahkan menurut data dari sebarannya pada setiap provinsi mencapai 61% dan dianggap sebagai darurat pernikahan anak(Koalisi Perempuan Indonesia.1:2017).

Untuk bidang kesehatan, masalah angka kematian ibu (AKI) dan anak di Indonesia masih tinggi yaitu hingga tahun 2018/2019 yakni diangka 305 per 1000 kelahiran hidup (Putri,A.W.1-4:2019). Di dunia kerja formal, tingkat partisipasi perempuan tidak sebesar laki-laki, yaitu 55,5%, berbanding 83,18% (Badan Pusat Statistik.13:2019). Partisipasi perempuan di politik pun tidak sebanding dengan laki-laki. Hanya ada 20.5% wakil perempuan di parlemen dan 6% kepala daerah yang merupakan perempuan (Media Indonesia.1-3:2019). Ketimpangan gender juga turut menyumbang ketimpangan pembangunan manusia di Indonesia. Capaian pembangunan manusia untuk laki-laki masih di atas perempuan. Pada tahun 2018,

BPS mencatat IPM laki-laki di Indonesia telah mencapai 75,43 atau telah berstatus “tinggi”. Sementara itu, IPM perempuan hanya mencapai 68,63 atau masih berstatus “sedang”. Ketimpangan ini tergambar dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia yang baru mencapai 90,99 pada tahun 2018.

Ketimpangan antarwilayah juga turut mewarnai dinamika pembangunan manusia di Indonesia. Luasnya wilayah Indonesia dan tidak meratanya pembangunan menyebabkan ketimpangan terjadi, baik antara perkotaan dengan perdesaan, antarprovinsi, antarkabupaten, antara kota dengan kabupaten, maupun antara wilayah barat dengan timur (Badan Pusat Statistik.13:2019).

Dalam bidang pendidikan formal masih mempunyai masalah ketimpangan terutama ketimpangan gender, misalnya terjadinya kesenjangan tentang rata-rata lama sekolah yaitu 7,9 tahun untuk perempuan dan 8,6 tahun laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan, dan di pedesaan laki-laki yang tidak sekolah 5,3% sedangkan perempuan mencapai dua kali lipatnya yaitu 11,9% (Institut Kapal Perempuan.1-2:2016), walaupun telah terjadi peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan, namun ketimpangan dan marginalisasi terhadap kaum perempuan dalam dunia pendidikan masih terus terjadi (Astutiningsih,S.E.37-55:2008).

Partisipasi perempuan dalam pembangunan khususnya di Indonesia pada dasarnya sudah terbuka dengan adanya PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) namun masih perlu diberikan pelatihan, keterampilan menyuluh bagi kader-kader, keterampilan berkomunikasi; dan peningkatan kemampuan lainnya(Lilik Aslichati.1-7:2011). Kurang maksimalnya partisipasi dalam berbagai sektor

pembangunan yang dialami oleh kaum perempuan digambarkan dalam bentuk marginalisasi, domestikasi, dan pengiburumahtanggaan (*Housewifization*) (Saptari,R& Holzner,B.9-17:1997).

Marginalisasi adalah sebuah proses penyingkiran atau menjauhkan dari kekuasaan dan sumber daya yang memungkinkan penentuan nasib sendiri dalam pengaturan ekonomi, sosial, atau politik. Menurut Niyama Alakhunova bahwa marginalisasi adalah suatu kondisi dan proses yang mencegah individu dan kelompok dari partisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang dinikmati oleh masyarakat luas (Alakhunova, Niyara. Oumar Diallo, I. M. del C. and W. T. 9:2015).

Marginalisasi memang sangat identik dengan kesetaraan gender yang melihat posisi peran laki laki dan perempuan terutama di ruang publik dan domestik. Lingkungan publik didominasi oleh laki-laki yang mencakup ekonomi, politik, kehidupan agama, pendidikan, dan kegiatan lain di luar tempat kediaman. Lingkup domestik didominasi oleh perempuan seperti urusan masak memasak, mencuci, mengurus anak. Dikotomi ini membawa akibat berupa lahirnya ideologi gender yang menjunjung superioritas alamiah laki-laki dan inferioritas alamiah perempuan(Khotimah,K.158–164:2009), bahkan negara juga bekerja secara sistematis untuk memarjinalkan perempuan dengan mendefinisikan laki-laki sebagai kepala rumah tangga (Muchtar, K.20-32: 2016).

Persoalan kesetaraan dalam bidang sosial, budaya dimana perempuan sangat tidak diuntungkan dengan konsep patriarkhi dalam kehidupan masyarakat. Patriarki diistilahkan "*rule by the fathers*"(Wood, Julia, T. 7-11: 2000) adalah

sistem struktur dan praktik yang menopang ketimpangan antara pengalaman, tanggung jawab, status, dan peluang berbagai kelompok sosial, terutama perempuan dan laki-laki. Peran perempuan sangat tergantung pada apa yang diputuskan oleh kaum laki laki. Mereka tidak bebas dalam menentukan tujuan dan nasib mereka sendiri atautkah ada otoritas khusus untuk memutuskan segala sesuatunya yang berkaitan dengan kehidupan pribadi maupun keluarga.

Kaum perempuan terutama yang masuk dalam kategori miskin, belum bisa berbicara banyak tentang hak-haknya baik itu dalam keluarga maupun di lingkungan mereka. Banyak hal seharusnya menjadi bagian yang mereka perjuangkan, tidak mampu dilakukan karena ada rasa ketakutan, ada rasa malu bahkan terancam jika menyuarakannya. Kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi dan perempuan menjadi korban karena ketidakmampuannya. Mereka mendapatkan perlakuan tidak adil dalam keluarganya.

Anggota keluarga berjenis kelamin perempuan tidak memiliki hak yang sama dibanding dengan anak laki-laki dalam pengambilan keputusan dalam keluarganya. Ayah akan memiliki kekuasaan mutlak terhadap kehidupan istri maupun anak-anaknya (Fakih,M.21-24:2001). Sementara itu domestikasi secara sederhana dapat dipahami sebagai sebuah upaya menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik yang perannya terbatas hanya pada urusan kerumahtangaan saja (Hidayah, S. N. 1–2: 2018).

Perempuan beradat timur yang sholehah menurut versi stereotipe patriarkat dimana pria mendominasi ruang publik dan ruang privat (Hardt, H. 45-110:1992), perempuan harus lemah lembut, sopan santun, lemah gemulai, diam,

berlindung di belakang laki laki, spesialis urusan domestic (Sholihah.107-155:2018). Urusan dapur, kasur, sumur sangat identik dengan pekerjaan perempuan terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses dalam ranah publik.

Konsep yang lain yang sangat identik dengan perempuan adalah “*pengiburumahtangaan*” (*housewifization*) yang merupakan proses dimana perempuan didefinisikan sebagai ibu rumah tangga, tanpa mengindahkan apakah ia benar-benar ibu rumah tangga atau tidak. Implikasi dari definisi tersebut adalah perempuan hanya dilihat sebagai pasangan dari laki-laki yang mencari nafkah, dan secara ekonomi, perempuan ditempatkan sebagai manusia yang tidak produktif, bergantung pada pendapatan suami, dan melakukan semua pekerjaan rumah tangga secara “*cuma-cuma*”.

Pengiburumahtangaan adalah strategi yang digunakan oleh kapitalis untuk mereproduksi tenaga kerja (buruh) laki-laki dan agen-agen konsumen melalui “*pendomestikan*” atau “*penjinakan*” perempuan dalam peran mereka sebagai ibu rumah tangga (Suryakusuma, J. Vol. 19-28: 2011).

Kondisi tersebut diatas pada umumnya menjadi masalah bagi perempuan terutama di negara negara berkembang dan mendorong berbagai kajian yang mengarah kepada strategi peningkatan kesejahteraan atau pemberdayaan perempuan dengan model advokasi atau pendampingan.

Advokasi adalah suatu bentuk aksi strategis dan terpadu yang dilakukan, baik oleh individu ataupun kelompok masyarakat dengan memasukkan masalah dalam agenda kebijakan dan mengontrol para pengambil keputusan untuk mengupayakan solusi, sekaligus membangun basis dukungan bagi penegakan dan

penerapan kebijakan publik yang dibuat untuk mengatasi masalah (Cangara, H. 2017:86-89).

Advokasi adalah proses inti untuk mengatasi ketidakadilan dan kesenjangan, menangani penyebab masalah yang mendasar untuk mencapai keadilan, dan menangani masalah keadilan untuk menyelesaikan penyebab masalah yang mendasarinya (Cohen, D., Bhandari Karkara, N., Stewart, D., Rees, N., & Coffman, 2010:3-7).

Advokasi juga merupakan langkah untuk merekomendasikan gagasan kepada orang lain untuk menyampaikan isu penting untuk dapat diperhatikan masyarakat serta membangun dukungan terhadap permasalahan yang diperkenalkan dan mengusulkan bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Advokasi terhadap sebuah kebijakan perlu dilakukan dengan alasan seringkali suatu kebijakan keluar tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan atau rasa keadilan masyarakat, atau suatu proses tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu pembuat dan atau pelaksana kebijakan tidak merasa perlu melakukan perubahan kearah positif, sehingga masyarakat sebagai subyek pembangunan diharuskan dapat dan mampu melaksanakan perubahan tersebut.

Dalam kegiatan advokasi, komunikasi menjadi aspek atau unsur yang penting. Menurut Goran Hedebro (Cangara,H. 2017:86-89) komunikasi berfungsi menciptakan iklim perubahan dengan memperkenalkan nilai nilai baru untuk mengubah sikap dan perilaku ke arah modernisasi serta menumbuhkan partisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap hal-hal yang menyangkut kepentingan orang banyak, terutama dalam implementasi suatu program pembangunan. Peran

komunikasi advokasi sekarang menjadi istilah tindakan utama dalam wacana pembangunan (Servaes J. & Malikhao P, 2012:230-232).

Komunikasi advokasi dibangun dalam pemahaman kritis di ruang publik (Wilkins, K.G. 2014a: 57-58), serta mengkonseptualisasikan proses dialogis, memfasilitasi praksis, dan menggabungkan refleksi yang bijaksana dengan tindakan yang diinformasikan (Freire,P. 2007:186-200).

Posisi komunikasi advokasi dalam upaya untuk meningkatkan daya kritis masyarakat dan menjadi instrumen untuk perubahan sosial yang horisontal, partisipatif dan memiliki orientasi (Bauer,T,J and R. 2016:10-30) dalam pelaksanaan pembangunan akan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat diberbagai sektor kehidupannya sekaligus menggunakan esensi dari disiplin — teori dan praktik komunikasi — untuk mempromosikan tujuan keadilan sosial (Carragee M.K & Frey L.R, 2016:3976-3978).

Berbagai bentuk komunikasi advokasi dilakukan di banyak negara terutama negara negara berkembang dengan tujuan untuk melihat serta menemukan cara dalam menghadapi persoalan pembangunan. Salah satu isunya adalah masalah pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan kaum perempuan. Di India, pendekatan pemberdayaan bagi perempuan bukan hanya tentang menyediakan layanan, tetapi juga mengadvokasi dalam hal mengenali realitas hidup mereka dari berbagai lapisan diskriminasi yang menghambat akses mereka ke layanan (Upadhyay, 2012:5-8).

Di Zimbabwe, Pusat dan Jaringan Sumber Daya Perempuan Zimbabwe dan Musasa *Project Trust* yang telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan

strategis dan hak asasi perempuan akar rumput di Zimbabwe, terutama melalui penyebaran informasi tentang status perempuan, memberikan pelatihan tentang isu-isu gender dan bekerja melawan kekerasan dalam rumah tangga (M.J.O, 2001:135-141).

Sementara di Bangladesh, advokasi dilakukan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemberdayaan perempuan yang memberikan kesimpulan bahwa kemiskinan dapat dikurangi di desa Bangladesh oleh wanita yang memperoleh pengetahuan dan pendidikan (Laizu, Z. et al., 2010:217-220).

Dalam komunikasi advokasi, salah bagian yang menjadi konsep utamanya adalah pendidikan. Pendidikan memainkan peran kunci dalam peningkatan kesejahteraan kaum perempuan, dan pencapaian kesetaraan gender dalam rumah tangga, komunitas, dan masyarakat luas. Pendidikan itu sendiri adalah hak asasi manusia, yang juga berfungsi sebagai *gateway* yang memungkinkan individu untuk mengakses dan menikmati hak asasi manusia lainnya. Pendidikan memperluas perspektif kaum perempuan tentang peran yang bisa dia mainkan; menyediakan sebuah ruang kunci (seringkali satu-satunya ruang) untuk bertemu dengan teman sebaya, mentor, dan panutan; dan terbuka ruang baru bagi seorang anak perempuan yang berdaya untuk bertindak, menjangkau, dan mempengaruhi orang lain.

Salah satu keunikan dalam dunia pendidikan adalah fakta yang pernah didapatkan itu, tidak bisa diambil (*Pacific, 2015:33*). Namun hal inipun juga masih menyisahkan masalah terutama pendidikan formal. Pendidikan formal belum membangun kekritisan dan tidak berdampak pada perubahan cara pandang

perempuan terhadap kondisinya. Tingkat kesadaran mereka masih banyak yang tergolong naif serta belum menyadari bahwa perempuan juga punya hak yang sama dengan laki laki.

Ironisnya, banyak perempuan menganggap perempuan tidak perlu pintar karena nantinya akan tidak disukai oleh laki-laki karena akan cenderung melawan. (Hasanah,I. 2016:2022-2031). Selain itu, masalah serius yang dialami oleh perempuan di Indonesia terjadi dalam bidang pendidikan (pendidikan di Indonesia digolongkan menjadi dua yaitu formal dan pendidikan nonformal-informal). Menurut kaum feminis radikal menyebutkan bahwa penyebab utama adanya ketidakadilan di dalam dunia pendidikan adalah karena sistem patriarki yang berlaku dimasyarakat setempat (Astutiningsih, S.E.2008:37-40). Pendidikan nonformal-informal tidak sejalan dengan upaya pembangunan manusia karena hanya berorientasi pada penguatan kecakapan hidup dan tidak dibarengi dengan pendidikan komunitas yang memberdayakan, mencerdaskan, membangun pemikiran kritis dan meningkatkan posisi tawar kaum perempuan.

Menyadari hal tersebut, salah satu LSM (*Non Government Organisation*) yang melakukan kegiatan advokasi terutama dalam peningkatan kualitas hidup dan hak hak perempuan adalah Institut Kapal Perempuan yang bekerjasama dengan YKPM Sulawesi Selatan. LSM ini mendirikan “*Sekolah Perempuan*” dengan mengembangkan metodologi pendidikan kritis yang menysasar kaum perempuan akar rumput (*grass root*) di desa desa di Indonesia khususnya di Kepulauan Spermonde. Bagi mereka pengorganisasian masyarakat dalam rangka membangun

kesadaran kritis khususnya bagi kaum perempuan sangatlah penting untuk keluar dari berbagai masalah dalam kehidupannya.

Kesadaran kritis menurut Paulo Freire adalah suatu materi pelajaran secara dialogis, materi akademik diintegrasikan ke dalam kehidupan dan pemikiran siswa (*McLaren P. & Leonard P*, 2014:153-166) dalam suatu model pendidikan yang membebaskan (Siswanto, 2007:250-254) yang memungkinkan seseorang mencapai pemahaman dan kesadaran atas realitas sosial dengan partisipasi langsung atau tidak serta setiap peserta dapat bertindak (Susanto, A.B. 2009:94-98).

Sekolah perempuan berupaya mengembangkan komunikasi advokasi melalui modul pendidikan dengan pokok pikirannya berfokus pada **isu isu gender, pluralisme, kesehatan reproduksi, perorganisasian dan advokasi** (Intan,G. 2018:1-2). Komunikasi advokasi terlibat dalam program program strategis yang mempromosikan hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia, serta dapat dijadikan sebagai wacana alternatif untuk melihat ketidakadilan gender sebagai masalah keadilan sosial (*Wilkins, K.G.* 2014b:58-59).

Sekolah Perempuan merupakan salah satu **model pemberdayaan** perempuan di kalangan akar rumput melalui proses pembelajaran atau pendidikan sepanjang hayat dengan **tujuan utama Sekolah Perempuan** adalah mengembangkan *leadership* atau kepemimpinan perempuan agar memiliki kesadaran kritis, kepedulian, solidaritas, kecakapan hidup dan berkomitmen menjadi pelaku perubahan sosial agar terbebas dari kemiskinan. Arah dari kepemimpinan perempuan ini diorientasikan untuk memperjuangkan kesetaraan

gender dan perdamaian di seluruh ranah, dimulai dari diri pribadi, keluarga, komunitas dan mendesakkannya dalam kebijakan pemerintah.

Sekolah Perempuan adalah wadah pembelajaran dan mengelola pengetahuan perempuan yang utamanya dikembangkan di komunitas-komunitas miskin pedesaan, perkotaan, pesisir dan kepulauan terpencil. Anggota komunitas belajar Sekolah Perempuan berasal dari beragam etnis, suku, agama, usia dan kemampuan fisik. Mereka belajar secara intensif setiap 1 atau 2 minggu sekali di rumah-rumah penduduk, lahan kosong, pinggir sungai, pinggir pantai, di kantor RW atau balai desa.

Proses pembelajaran Sekolah Perempuan dikaitkan dengan analisis struktur yang lebih luas terkait sistem ekonomi, sosial, politik dan budaya. Wilayah pengembangan Sekolah Perempuan adalah desa miskin kepulauan, desa miskin pesisir, wilayah kering, desa miskin rawan bencana alam, dan desa miskin lainnya. Dalam kegiatan ini dilakukan penguatan identitas berbasis nilai-nilai konservatif, wilayah dengan kerusakan lingkungan dan kelurahan miskin kota yang rawan bencana banjir.

Keberadaan Sekolah Perempuan di Pulau Spermonde (Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) sejak tahun 2013 memiliki pekerjaan rumah yang berat dengan fakta hasil penelitian dan data berikut ini:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 65,24 (sedang) berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi pada tahun 2013. (Badan Pusat Statistik, 2019:13)
2. Penduduk miskin 52,300 jiwa dengan persentase 16,6 % (2013) dan tertinggi di Sulawesi Selatan.

3. Pada tahun 2013 terjadi kematian 28 bayi atau 4,70 setiap per 1000 kelahiran hidup balita (BPS) dan tertinggi ke empat di provinsi Sulawesi Selatan.
4. Terdapat 13.47% kepala keluarga perempuan.
5. Angka kekerasan dalam rumah tangga sepanjang tahun 2017 tercatat terdapat 37 kasus kekerasan terhadap perempuan, usia 0 – 18 tahun 18 kasus, usia 18-25 tahun sebanyak 4 kasus dan diatas 25 tahun sebanyak 15 kasus (DPPPA Kab.Pangkep (DPPPA Kab.Pangkep, 2018).
6. Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 65,35 (Sulawesi Selatan 69.50)
7. Ditemukan pula bahwa 8.55% penduduk berusia 5- 24 tahun putus sekolah karena menikah dan 45.32% penduduk yang usia menikah pertamanya berada di rentang 10 – 20 tahun (2013-1017).
8. Proporsi laki-laki dengan ijazah tertinggi menengah ke atas lebih tinggi dibandingkan perempuan, serta proporsi laki-laki dengan ijazah tertinggi SD/ sederajat atau belum memiliki ijazah lebih kecil dibandingkan perempuan. (>SMP Lk 24.28%, Pr. 22.62% dan Belum punya ijazah atau setingkat SD Lk. 59.86% sedangkan Pr. 61.74%) (Isdijoso et al., 2019:10-13).

Berdasarkan pengamatan peneliti, masalah-masalah perempuan pulau terutama di wilayah Kepulauan Spermonde terjadi dalam berbagai sektor dan kompleks. Masalah ini diyakini sudah terjadi sejak lama yang disebabkan oleh kondisi dan situasi geografis, prinsip-prinsip kehidupan yang turun temurun serta kebijakan pemerintah yang belum mampu mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Keberadaan program perlindungan sosial antara lain, raskin (beras untuk masyarakat miskin), program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat, dan

lainnya, belum mampu membawa kaum perempuan keluar dari masalah yang ada. Peranan di ruang publik sangat terbatas, baik secara sosial, ekonomi apalagi sisi politiknya, menyebabkan kaum perempuan pada umumnya tersisih dari peranan produktifnya (Khotimah, 2009:158-164), dan berpengaruh pada tingkat kesejahteraannya.

Masalah yang melingkupi kaum perempuan di Kepulauan Spermonde antara lain; dalam bidang pendidikan, banyak perempuan pulau yang tidak bisa mengenyam pendidikan mulai dari jenjang, SD, SMP, SMA apalagi perguruan tinggi, yang menyebabkan angka buta huruf juga tinggi. Kondisi ini diakibatkan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan seperti kurangnya tenaga pendidik di wilayah kepulauan, akses transportasi yang tidak mendukung pada saat saat tertentu seperti musim gelombang tinggi dan musim hujan. Selain itu, Hal lain yang juga menjadi penyebab putus sekolah terutama bagi kaum perempuan pulau adalah pernikahan.

Mereka harus menerima nasib dijodohkan maupun dipaksa untuk menikah walaupun belum cukup umur. Istilah "*lolongeng deceng*" (mendapatkan kebaikan) menjadi alasan bagi orang tuanya untuk menikahkan mereka dan tidak peduli apakah cukup umur, siap mental lahir bathin, dan terpenting secara ekonomi siap mengarungi rumah tangga. Bagi kaum perempuan pulau, pernikahan bukan melahirkan kesejahteraan tapi terkadang menjadi musibah. Masalah ini menjadi masalah turun temurun. Usia dimana mereka seharusnya mengenyam pendidikan dengan baik harus digadaikan dengan menimang bayi dan meratapi nasib.

Di bidang ekonomi. Perempuan pulau kurang memiliki produktivitas, yang penyebabnya karena rendahnya tingkat pendidikan. Tingkat keterampilan yang rendah serta kurang akses informasi membuat kaum perempuan sulit untuk berkreasi dan kebanyakan kegiatan hanya bekerja diruang domestik yakni rumah tangga. Kalaupun dia mendapatkan tambahan dengan membantu suami seperti kegiatan menjual ikan hasil tangkapan, dianggapnya hanya sebagai bagian dari hasil kerja suami. Hal yang menjadi ironi juga adalah pekerjaan nelayan yang merupakan profesi paling banyak di wilayah kepulauan hanya diperuntukkan bagi kaum laki laki. Berbagai bantuan seperti alat penangkap ikan, mesin perahu dan perahunya, tidak ada satupun dialamatkan kepada kaum perempuan, padahal pada kenyataannya banyak kaum perempuan di pulau yang berprofesi nelayan karena menjadi kepala rumah tangga perempuan dan menjadi penopang hidup keluarganya.

Dalam bidang sosial, masalah yang juga sering menjadi perhatian di wilayah kepulauan adalah kekerasan dalam rumah tangga. Banyak kasus kekerasan baik fisik maupun psikis yang biasanya disebabkan oleh masalah ekonomi dan menjadikan mereka hanya bisa menerima karena tidak mampu untuk menemukan jalan keluar. Tindak kekerasan fisik yang selamanya menjadikan kaum perempuan menjadi korban dalam rumah tangga, tidak terungkap karena ada unsur “*malu*” juga dianggap tabu bahkan aib keluarga untuk mengungkapkannya apalagi sampai melaporkan ke pihak berwenang. Kasus lainnya juga banyak ditemui yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan psikis yaitu status yang menggantung karena

ditinggal pergi suami tanpa ada kabar dan keputusan sehingga tidak bisa bertindak ataupun mengambil keputusan karena takut.

Berbagai faktor yang menyebabkan kaum perempuan terutama di wilayah Kepulauan Spermonde masih belum mampu keluar dari jeratan masalah, seperti kurangnya keterlibatan dan pelibatan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. Mereka hanya dianggap sebagai pelengkap pembangunan. Dalam bahasa Bugis ada kata kata yang sering muncul untuk menutup ruang bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan yaitu “*maelo tokko maga*” (kalian -kaum perempuan- bisa kerja apa), *agato muissengengi* (kalian tahu apa), *parompa rompai maccue rapa*” (hanya menyusahkan kalau ikut rapat atau diskusi). Frasa ini mengandung implikasi dan makna bahwa kaum perempuan tidak perlu ikut dalam merumuskan pembangunan karena dianggap tidak mengetahui sebaliknya hanya menjadi beban.

Walaupun pada dasarnya, kaum perempuan dalam adat Bugis memiliki peran yang strategis dalam keluarga. Dalam naskah kuno perempuan Bugis disebut berani (*materru'*) dan bijaksana (*malampé' nawa nawa*) (Mustari,A. 2016:139-145) dan secara sosial mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati (Kesuma,A..I. 2019:322-327). Pemahaman ini menunjukkan bahwa dalam tataran kehidupan sosial dan budaya, kaum perempuan khususnya perempuan pada masyarakat Bugis memiliki kemampuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya dalam berbagai hal serta dapat mengaturnya dengan baik dalam situasi apapun.

Oleh karena itu, posisi kaum perempuan di wilayah Kepulauan Spermonde memerlukan komunikasi advokasi yang dapat mengeluarkan mereka dari kondisi

yang kurang menguntungkan. Hal inilah yang menurut *Sudweek* (Laizu Z. et al., 2010:217-230) bahwa ruang mental perempuan menjadi masalah kritis karena memiliki hubungan yang kompleks dengan ruang non metal lainnya. Begitupun dengan Julia Cleves Mosse (Astutiningsih, S.E 2008:37-42), bahwa dalam konteks ini, perempuan bukan hanya butuh untuk dilibatkan, tetapi relasi gender yang adil sangat dibutuhkan dalam berbagai sektor kehidupan tersebut.

Sebagai perbandingan kegiatan komunikasi advokasi, beberapa penelitian yang dijadikan sebagai acuan antara lain penelitian dari Jan Servaes (Servaes J. & Malikhao P, 2012:229-243) mengenai *advocacy communication for peacebuilding*. Dalam penelitian Servaes mengatakan bahwa: advokasi komunikasi, pada dasarnya, menyiratkan cara memperoleh komitmen politik dan dukungan kebijakan melalui aksi sosial yang terorganisir dengan melibatkan individu yang memiliki berkomitmen. Hal ini dibutuhkan untuk membentuk kekuatan yang berpengaruh dan keterlibatan sektor-sektor masyarakat yang bersangkutan.

Oleh karena itu, tindakan yang penting untuk dilakukan, yakni mengaktifkan media untuk mendapatkan dukungan publik dan menekan pengambil kebijakan, membentuk aliansi masyarakat dalam rangka memobilisasi kekuatan serta membangkitkan respon para pemimpin untuk mengakomodir kebutuhan publik (Servaes J. & Malikhao, P. 2012:238-240).

Dalam penelitian lainnya, Signorelli (Signorelli & Odone, 2015:738-739) dengan judul "*Advocacy Communication, Vaccines and The Role of Scientific Society*", menyajikan model komprehensif untuk komunikasi advokasi yaitu payung advokasi kesehatan masyarakat. Model advokasi komunikasi yang

diterapkan dalam bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan melalui vaksin yang diterapkan untuk mengadvokasi kebijakan dan program imunisasi di Italia. Menurutnya tindakan komunikasi advokasi harus dikombinasikan dengan latar belakang ilmiah yang kuat, dokumen program, komunikasi yang efektif, pemantauan dan evaluasi dan tidak adanya kepentingan yang bersaing.

Namun dari berbagai hasil penelitian tersebut belum kelihatan unsur keberlanjutannya khususnya bagaimana para peserta yang telah mendapatkan advokasi dapat menjadi agen baru untuk peserta lain. Unsur kesinambungan ini bukan hanya sekedar apakah terlaksana tanpa melihat dampak serta kemampuan masyarakat ini juga menterjemahkan kepada mereka yang belum mengerti dan mengikutinya. Komunikasi advokasi yang dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan kritis spesifik dalam menghadapi masalah yang dialami kaum perempuan di Kepulauan Spermonde melalui kegiatan sekolah perempuan dengan konsep *communication planning for community development* (pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sekitar) yang menuntut para pesertanya untuk lebih memahami posisi mereka dalam kehidupan bermasyarakat serta hak-hak mereka dalam kegiatan pembangunan.

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji suatu bentuk komunikasi advokasi melalui pendidikan non-formal yang dikenal dengan nama Sekolah Perempuan Pulau. Peran Sekolah Perempuan dalam mengadvokasi kaum perempuan pulau dalam mendapatkan hak hak mereka serta mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang berkeadilan gender dilakukan melalui metode pendidikan sepanjang hayat dengan materi pemberdayaan dan penyadaran kritis.

1.2 Pokok Masalah

Berdasarkan hasil observasi dan kajian data yang penulis jadikan acuan awal penelitian ini, ditemukan sejumlah pokok masalah yang membutuhkan kajian yang lebih mendalam mengenai Komunikasi Advokasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pendidikan Nonformal Sekolah Perempuan di Kepulauan Spermonde :

1. Masih lemahnya kemampuan kaum perempuan dalam pengembangan potensi keterampilannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya aksesibilitas dan literasi media kaum perempuan karena terbatasnya jaringan telekomunikasi, baik untuk media arus utama (*mainstream media*) maupun untuk media baru (*new media*), serta kurangnya keberanian kaum untuk memanfaatkan ruang publik (*publik sphere*) dalam menyampaikan aspirasinya.
2. Belum efektifnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan yang berdampak pada kurangnya kebijakan yang berpihak kepada kaum perempuan sehingga membutuhkan komunikasi advokasi.
3. Masih kurangnya dukungan *stakeholders* atau pemangku kepentingan dalam membantu mengatasi dan mencari solusi terhadap masalah kaum perempuan di daerah ini, walaupun ada biasanya pada saat terminalisasi, maka proyek berhenti dengan sendirinya tanpa kelanjutan.
4. Dalam proses advokasi, peran fasilitator sebagai sumber informasi masih dominan sehingga masyarakat sangat tergantung kepadanya, dengan kata lain

komunikasi berjalan satu arah secara linear. Padahal komunikasi dibutuhkan untuk memberikan preferensi terhadap pendekatan horisontal yang mendorong dialog yang berpusat pada analisis masalah dan pencarian solusi, serta pendekatan dari bawah ke atas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pembuat keputusan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana Tata Kelola Sekolah Perempuan dalam mengembangkan potensi keterampilan kaum perempuan di Kepulauan Spermonde?
2. Bagaimana proses komunikasi advokasi yang dilakukan pada sekolah perempuan di Kepulauan Spermonde?
3. Tantangan apa saja yang dihadapi oleh sekolah perempuan dalam proses Komunikasi advokasi di Kepulauan Spermonde ?
4. Capaian apa yang diraih sekolah perempuan dalam proses komunikasi advokasi sehingga memberikan dampak terhadap kaum perempuan Pulau Spermonde?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya mengkaji dan mengeksplorasi model komunikasi advokasi yang dilaksanakan oleh sekolah perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga kaum perempuan di Kepulauan Spermonde.

Adapun tujuan penelitian berdasarkan masalah diatas adalah untuk :

1. Mendeskripsikan Tata Kelola Sekolah Perempuan dalam mengembangkan potensi keterampilannya guna meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.

2. Mengungkapkan proses komunikasi advokasi yang dilakukan oleh pendamping dan peserta pada sekolah perempuan di Kepulauan Spermonde.
3. Mendeskripsikan tantangan yang dihadapi sekolah perempuan dalam pelaksanaan komunikasi advokasi.
4. Mendeskripsikan capaian yang diperoleh sekolah perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kepulauan Spermonde.

1.5 Kegunaan Penelitian

Pembahasan beberapa masalah dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1.5.1 Secara Teoritis (Bagi Pengembangan Ilmu)

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai kompetensi dan peran ilmu komunikasi dalam pelaksanaan program pembangunan.
2. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumber data dan bahan kajian dalam pengembangan ilmu komunikasi khususnya komunikasi pembangunan.
3. Diharapkan hasil penelitian ini melahirkan temuan ilmiah, baik yang bersifat aplikatif maupun yang bersifat teoritik bagi pengembangan komunikasi dalam bidang advokasi.

1.5.2 Secara Praktis (Bagi Penerapan Ilmu)

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan terutama di wilayah kepulauan dengan pendekatan komunikasi advokasi terhadap setiap program kegiatan pembangunan agar program tersebut dapat tetap sasaran, efektif dan efisien serta memberikan hasil yang memuaskan sesuai dengan tujuan program pembangunan tersebut.
2. Khusus bagi masyarakat, terutama kaum perempuan di Kepulauan Spermonde, dapat menjadi bahan maupun masukan dalam setiap aktivitas pembangunan di wilayahnya. Pelaksanaan komunikasi advokasi sekolah perempuan dapat meningkatkan pengetahuan kaum perempuan terutama dalam mengenal dan

mengetahui hak hak mereka serta dapat dijadikan dasar dalam menuntut pemenuhannya terutama terhadap pembuat kebijakan.

1.5.3. Nilai Kebaruan Penelitian

Telah banyak dilakukan penelitian dalam lingkup komunikasi advokasi di lingkungan sekolah tetapi belum ada penelitian mengenai komunikasi advokasi di lingkungan. Penelitian mengenai komunikasi advokasi pun biasanya dari perspektif atau kondisi Sekolah Perempuan akibat dari paparan media dan cetak.

Penelitian mengenai konteks Komunikasi Advokasi focus pada Sekolah Perempuan dan Pendidikan non-formal. Sedangkan penelitian mengenai hubungan sebagai sekolah belum banyak yang membahas dalam Ilmu Komunikasi.

Kebaruan dalam penelitian ini focus pada komunikasi advokasi antara sekolah perempuan dan Pendidikan non-formal yaitu proses komunikasi baik bicara dan diskusi. Pisau Analisa penelitian ini menggunakan teori persuasive, teori komunikasi feminis, dan teori pemberdayaan, dimana teori awalnya digunakan untuk menganalisa komunikasi advokasi pada beragam tanpa menyebutkan dalam konteks yang seperti apa. Sehingga dapat disimpulkan, penelitian ini merupakan media baru bagi pengujian teori ini dalam konteks sekolah perempuan di pulau.

Selain itu, penelitian juga akan meneliti beberapa sekolah perempuan dengan kondisi yang berbeda sehingga dapat ditemukan berbagai bentuk komunikasi advokasi di lingkungan sekolah perempuan yang bervariasi dari sisi jumlah pulau tergantung pada sarana prasarana yang dimiliki sekolah perempuan di pulau.

Komparasi dari sekolah perempuan tingkat atas yang ada akan memberi banyak informasi dan pengetahuan. Hal baru lainnya dari penelitian ini adalah penggunaan perspektif sekolah perempuan yang akan digunakan.

1.6 Signifikansi Penelitian

Penelitian yang signifikan melakukan kajian ulang metode-metode yang sudah digunakan saat ketentuan sudah dipenuhi. Penelitian ini akan menjadi Sekolah Perempuan di Pulau Spermonde sebagai narasumber dimana nantinya Analisa akan menggunakan Teknik untuk bentuk sifat, perilaku dan komunikasi advokasi. Hasil dari penelitian ini sangat penting sekolah perempuan mendapatkan masukan dan informasi serta pengetahuan bagi mereka dalam menghadapi beragam elemen Sekolah Perempuan.

Dengan mendapat pengetahuan mengenal berbagai bentuk sifat dan perilaku komunikasi advokasi, elemen elemen komunikasi yang dapat melancarkan kesuksesan interaksi Sekolah Perempuan di pemerintah, dan masyarakat mengetahui cara cara untuk memastikan pesan yang disampaikan dapat memperoleh reaksi sesuai dengan pemaknaan diharapkan meski dengan latar belakang perempuan, target kurikulum, profil dapat tercapai. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadikan masukan bagi pemerintah terutama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Bappenas dalam merumuskan kebijakan Sekolah Perempuan. Sebuah buku akan dihasilkan dalam merangkum hasil penelitian sehingga akan lebih banyak lagi para komunikasi terinformasi dan mendapat tambahan pengetahuan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Komunikasi dan Partisipasi

Dalam memperkaya khasanah penelitian ini, berbagai hasil riset telah digunakan sebagai bahan perbandingan dan rujukan. Hal ini sangat penting untuk dapat melihat dan mengkaji sejauhmana kebaruan penelitian ini terutama dalam komunikasi advokasi yang berhubungan dengan kaum perempuan, pendidikan, dan pembangunan.

Salah satu bagian terpenting dalam pengembangan komunikasi advokasi adalah komunikasi dan partisipasi. Partisipasi merupakan konsep pengembangan masyarakat secara umum dan luas, yang prosesnya berjalan secara dinamis dan interaktif yang ditunjang oleh nilai-nilai pengetahuan, keterampilan, sumber daya dan proses proses lokal (Ife & Tesoriero, 2008:285-332).

Walaupun pengertian dasar mengenai komunikasi partisipasi belum menemukan bentuk yang ideal dan dapat diterima secara luas (Dagron, 2001: 7-11), (Huesca, 2008:1-13) (Tufte & Mefalopulos, 2009:9-15) namun ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan komunikasi partisipatif. Komunikasi partisipasi dapat dilakukan dengan pendekatan monolog, dialog, atau *multi track* (Tufte & Mefalopulos, 2009:9-15) yang melibatkan penyebaran pesan, transmisi informasi, atau membujuk orang untuk mengubah perilaku (Srampickal, Jacpb, 2006:2-23) melalui informasi, persepsi, dan pendapat bahkan beradu argumentasi diantara berbagai pemangku kepentingan dalam rangka

memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, terutama bagi mereka yang paling rentan dan terpinggirkan.

Komunikasi partisipatif bukan hanya pertukaran informasi dan pengalaman, tetapi juga eksplorasi dan generasi pengetahuan baru yang ditujukan untuk mengatasi situasi yang perlu ditingkatkan. Komunikasi harus terjadi diantara semua pihak yang terkena dampak (Tuftes & Mefalopoulos, 2009:9-15) dan mereka memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi bahkan mempengaruhi hasil yang ingin dicapai, yang diistilahkan dengan insiatif dari semua pihak.

Dalam berbagai kasus terutama dalam konteks pembangunan yang dihubungkan dengan penerima manfaat, banyak kegiatan yang hanya menekankan pada konsep prosedural dengan lebih mementingkan kerangka kerja yang fleksibel terutama masalah waktu, kondisi politis (banyak kegiatan pembangunan yang lebih mengutamakan kepentingan politik, kesepakatan politik antar lembaga yang sering mengatasnamakan konstituen), dan faktor penyesuaian laporan laporan yang sesuai dengan petunjuk teknis namun sangat miris karena tidak memperhatikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

Saat ini, kegiatan atau program banyak yang membuang nilai partisipasi akar rumput, pengetahuan lokal, dan kepercayaan budaya yang dianggap sebagai "*mitos lama*" dan dianggap tidak sesuai dengan globalisasi (Huesca, 2008:1-13). Ini adalah kenyataan yang sangat kontradiktif dimana semua konsep program pembangunan selalu mengatasnamakan rakyat. Padahal yang sangat dibutuhkan adalah pengembangan dialog sosial antara individu, lembaga dan budaya. Komunikasi partisipatif tidak hanya mengakomodasi kepentingan masyarakat

dalam hal informasi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat memiliki kesadaran terhadap lingkungan, dirinya sendiri, serta kekuatan yang mereka miliki untuk menjawab permasalahan yang dihadapi (Sinaga et al., 2016:191-201).

Dalam pelaksanaan suatu program dengan model partisipasi maka salah satu tujuan utamanya adalah bagaimana kelembagaan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dalam mengelola kelembagaan dengan berdasarkan pada pendekatan partisipatif maka perlu disadari bahwa ada keterkaitan keberlanjutan organisasi dengan cara mengelola masyarakat yang terlibat didalamnya.

Gambar 1.1, menunjukkan bahwa peran komunikasi secara internal akan sangat membantu dalam mengatasi atau mempengaruhi resistensi terhadap perubahan yang terjadi serta keterlibatan kelanjutan partisipasi masyarakat. Suatu masyarakat pasti tidak akan langsung berpartisipasi dalam sebuah kegiatan apalagi merubah nilai nilai yang sudah melekat dalam masyarakat (misal: patriarkhi dan pemahaman kedudukan dengan perspektif gender) dan ini juga berkaitan dengan keikutsertaan mereka dalam program tersebut.

Untuk itu, peran komunikasi secara internal adalah meningkatkan kesadaran dan mentransfer pengetahuan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam program yang akan dilaksanakan. Sementara itu, untuk mendukung kegiatan dan meyakinkannya, maka dibutuhkan *stakeholder* seperti pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM atau media untuk melakukan pendekatan secara berkelanjutan dalam mengawal dan mengontrol jalannya program atau organisasi. Dalam kerangka keberlanjutan organisasi ini maka harus didukung saluran saluran komunikasi yang dengan konten yang lebih lengkap dan memasyarakat.



GAMBAR 1. MODEL KEBERLANJUTAN ORGANISASI BERBASIS PARTISIPASI

Komunikasi partisipatif menurut Servaes (Servaes, 2008:201-218) mengandung maksud, bahwa masyarakat adalah aktor dinamis serta aktif dalam proses perubahan sosial, dimana prosesnya disesuaikan dengan komunitas (isi, bahasa, media), dengan mengedepankan dialog serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk ikut dalam proses tersebut guna meningkatkan kesadaran mereka menyangkut haknya. Selain itu, penekanannya terletak pada partisipasi dan keterlibatan dari proses perencanaan sampai pengambilan keputusan (Susanti, Elly. 2015:1-11), berkaitan dengan akses terhadap pembangunan dan pendekatan hak asasi manusia dalam program pembangunan (Thomas, dalam (Hadiyanto, 2008: 80-89), yang manfaatnya untuk saling berbagi informasi, pengetahuan dan menyelesaikan masalah (Sugito et al., 2018:1-14).

Dalam pengembangan komunikasi partisipatif, Servaes (Servaes, 2008:201-218) mengemukakan dalam *Communication for Development*

Approaches of Some Governmental and Non-Governmental Agencies, bahwa dalam komunikasi partisipatif:

- a) Masyarakat adalah aktor yang dinamis, aktif terlibat dalam proses perubahan sosial dan turut mengendalikan cara-cara komunikasi dan isi komunikasi, alih-alih sebagai penerima informasi dan petunjuk-petunjuk berperilaku yang pasif, sementara orang lain yang membuat keputusan kehidupan mereka.
- b) Proses komunikasi disesuaikan dengan komunitas atau kelompok sosial tertentu, baik menyangkut isi, bahasa, budaya maupun media yang digunakan.
- c) Dialog yang dilakukan berbasis komunitas dan cara-cara komunikasi ditujukan untuk membantu mengidentifikasi, mendefinisikan perbedaan antara *felt needs* dan *real needs*.
- d) Proses komunikasi merupakan "*hak rakyat*" yang dimiliki untuk memberikan kesempatan yang sama pada komunitas.
- e) Proses untuk mencapai kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial, masalah serta solusinya.

Perkembangan komunikasi dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk lebih meningkatkan peran seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan.



GAMBAR 2 KEKUATAN PARTISIPASI DENGAN *STAKEHOLDER*

Pada gambar 1.2, menunjukkan bahwa peran *stakeholder* dalam komunikasi partisipasi sangat menentukan. Adapun langkah langkah yang dapat dilakukan agar seluruh *stakeholder* dapat terlibat adalah,

1. Pertama membuka ruang diskusi atau dengar pendapat dengan mereka. Hal ini penting untuk bisa mendapatkan informasi dan pengalaman dalam menentukan langkah langkah yang perlu dilakukan terutama dilapangan.
2. Kedua membagi informasi dan pengetahuan. Salah satu bentuk kerangka kerja yang partisipatif adalah membagi pengetahuan yang banyak kepada komponen masyarakat yang terlibat. Walaupun disadari bahwa tingkat pengetahuan *stakeholder* itu berbeda beda namun kita harus memiliki wawasan dalam menilai informasi apa yang sebaiknya diberikan dan bagaimana cara menginformasikan.
3. Ketiga mendorong kolaborasi ide. Dalam komunikasi partisipasi, sangat penting menciptakan kondisi yang menarik dan terbuka. Menggali ide ide melalui

diskusi kelompok dari seluruh *stakeholder* sangat berarti untuk menjadi bahan analisis.

4. Keempat, mensintesa informasi yang tersedia. Dari sekian banyak diskusi, dengar pendapat maupun pertemuan yang dilaksanakan maka penyaringan informasi perlu dilakukan untuk mengkaji mana yang baik dan mana yang tidak perlu kemudian dirangkum menjadi kumpulan data. Hal ini penting untuk pengambilan keputusan sehingga tidak terjadi kerancuan ataupun kesalahan, dan jika ada yang kurang atau kabur itu akan menjadi dasar untuk mengembangkannya ke diskusi lanjutan.
5. Kelima, membuat keputusan yang tepat. Sebuah keputusan yang tepat tergantung seberapa akurat data yang dimiliki. Dalam konteks komunikasi partisipatif, sebuah keputusan akan kuat karena data diperoleh dari informasi diskusi dengan seluruh *stakeholder* sehingga keputusan yang diambil adalah hasil berfikir bersama, dan segala konsekuensinya menjadi tanggung jawab bersama.
6. Keenam, mengkomunikasikan keputusan kepada seluruh komponen. Setiap keputusan yang diambil harus dikomunikasikan sehingga semua dapat menerima dan menindaklanjutinya. Keputusan keputusan ini harus dijelaskan dasar dan arahnya sehingga setiap *stakeholder* atau komponen masyarakat dapat memahami peran masing masing dalam keputusan tersebut.

Pada prinsipnya, kegiatan yang dilakukan tidak lagi sekedar menyelesaikan program tapi lebih menekankan keterlibatan masyarakat untuk menentukan arah pembangunan sesuai dengan kondisi dan realitas komunitas terutama pemenuhan hak hak mereka dengan proses yang dialogis. Realitas sosial

masyarakat yang semakin dinamis serta didukung oleh perangkat teknologi yang memungkinkan mereka bisa berpartisipasi serta mengakses dimana dan kapanpun kegiatan pembangunan itu dilaksanakan.

Hal ini bukan lagi menjadi alasan untuk tidak melibatkan mereka dalam proses kegiatan pembangunan. Seluruh masalah kehidupan sosial masyarakat harus diberikan dan dicarikan solusi sehingga seluruh sendi kehidupannya bergerak. Namun komunikasi dengan pendekatan partisipatif yang menitikberatkan pemberdayaan masyarakat akan mengalami kegagalan jika tidak memenuhi prasyarat sebagaimana disebutkan oleh (Hadiyanto, 2008:84-85), yaitu:

1. Masyarakat tidak diposisikan sebagai obyek pembangunan tetapi subyek yang aktif dari seluruh kegiatan tersebut.
2. Komunikasi harus yang berorientasi khalayak bukan hanya pada sumber.
3. Tidak ada dominasi informasi dari salah satu pihak dalam artian menggunakan konsep mitra sejajar.
4. Keputusan berdasarkan hasil interaksi dan transaksi yang berkelanjutan sehingga mampu mempertahankan komitmen.
5. Keterbukaan akses yang luas untuk memberikan kesempatan bagi setiap unsur untuk memanfaatkan media yang tersedia.

Disisi lain Ketan S. Chitnis (Chitnis, 2005: 82-96) dalam disertasinya berjudul: *Communication for Empowerment and Participatory Development: A Sosial Model Health in Jamked, India* menyebutkan bahwa:

1. Partisipasi bersifat pasang surut dan tergantung pada prioritas masyarakat.
2. Partisipasi komunitas dan agen perubahan luar dapat hidup berdampingan.

3. Dialog dengan fasilitasi yang tepat dapat merangsang aksi kolektif.
4. Para pembantu profesional dan agen perubahan dapat dilatih untuk menjadi komunikator yang efektif.
5. Proyek pengembangan khusus perlu memperhitungkan kepentingan diri sendiri.
6. Partisipasi membutuhkan perubahan sosial dan kemauan politik.
7. Partisipasi adalah proses perubahan sosial yang lambat.

Pengalaman pembangunan berpuluh puluh tahun dengan konsep lebih mengandalkan proses satu arah bukanlah sesuatu yang mudah untuk diubah dengan konsep yang lebih terbuka dan partisipatif. Proses ini membutuhkan komitmen dan kemauan yang kuat serta perencanaan yang matang dari seluruh komponen pengambil kebijakan mulai dari tingkat paling tinggi sampai ke level yang berhadapan langsung di lapangan. Seperti yang digambarkan diatas bahwa proses komunikasi harus dikembangkan lebih interaktif sehingga membuat hasil lebih tepat sasaran dan berguna karena sumber masalah yang terjadi harus diselesaikan berdasarkan kondisi masyarakat.

Pembangunan tidak lagi hanya dikembangkan berdasarkan satu arah dimana pemerintah dianggap sebagai satu satunya yang bisa menyelesaikan seluruh permasalahan kehidupan masyarakat. Pemerintah harus memposisikan diri sebagai mitra strategis dan mitra sejajar bagi masyarakat dalam proses pembangunan. Seluruh proses mulai dari perencanaan sampai kepada evaluasinya, masyarakat hadir di dalamnya, bukan hanya pelengkap melainkan juga sebagai aktor aktor pembangunan. Bahkan jika memungkinkan dan menganggap masyarakat belum mampu mengikuti *ritme* pembangunan, kehadiran para pendamping professional

yang berasal dari para *stakeholder* seperti lembaga swadaya masyarakat atau LSM dapat menjadi alternatif pemecahan masalah.

Kenyataan menunjukkan bahwa proses pembangunan di negara sedang berkembang maupun negara berkembang dan negara maju, banyak didukung oleh lembaga lembaga non pemerintah untuk membantu program program yang dianggap strategis dan membutuhkan inovasi program yang lebih terarah dan didukung metode yang lebih baik.

Dari berbagai hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangatlah penting bukan hanya sebagai obyek tetapi harus menjadi pelaku dalam pelaksanaan proses pembangunan terutama dalam kaitannya dengan komunikasi yang harus lebih ditingkatkan. Beberapa hal yang menjadi penting untuk menjadi perhatian dalam komunikasi dan partisipasi antara lain:

1. Dalam proses pembangunan sangat dibutuhkan ruang ruang dialogis antara seluruh komponen pembangunan dengan lebih mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam proses, pelaksanaan bahkan evaluasi program pembangunan.
2. Pemerintah seyogyanya menjadi mitra sejajar dan mitra strategis masyarakat, sehingga pemenuhan hak hak masyarakat dalam pembangunan dapat terlaksana dengan baik.
3. Pentingnya model komunikasi yang tepat terutama dalam dalam mendorong komunikasi yang partisipatif dengan melibatkan unsur unsur pendamping dan profesional, dengan pola pendekatan atau engagement yang intensif, terukur, dan berkesinambungan dalam bentuk komunikasi advokasi. Banyak kegiatan

komunikasi partisipatif yang dilakukan tetapi tidak mendapatkan hasil yang baik karena tidak didukung komunikasi advokasi yang maksimal.

2.1.2 Gender dan Kemiskinan

Gender sebagai suatu konstruksi sosial yang menciptakan perbedaan peranan dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Kondisi kehidupan masyarakat dan keluarga, seringkali dipandang sebagai faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan yang cenderung merugikan dan memiskinkan perempuan (Akhmadi, N. 2005:3-10). Ketimpangan gender memperparah kemiskinan perempuan dan sebaliknya kemiskinan itu sendiri berkontribusi terhadap semakin tajamnya ketimpangan gender (Indraswari, 2009:40-52).

Menurut Todaro (Mulasari, 2015:254-263) mayoritas penduduk miskin di dunia adalah kaum perempuan, terutama negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Sebagai fenomena sosial yang multi dimensional, kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan dimensi ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan masalah struktural, psikologis, kultural, ekologis dan faktor lain. Perempuan adalah yang paling menderita kemiskinan, kekurangan gizi, dan paling sedikit menerima pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan berbagai bentuk jasa sosial lainnya.

Perempuan memang lebih miskin dibandingkan laki-laki dan hal itu semakin menguat, sejalan dengan perkembangan konseptualisasi kemiskinan yang tidak lagi memandang kemiskinan dari dimensi konsumsi rumah tangga saja, tetapi kemiskinan sebagai keterbatasan akses dan kemampuan serta kesempatan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kesejahteraan. Di semua belahan dunia, relasi gender mempengaruhi kesempatan kerja, pembagian kerja, pendapatan,

pendidikan, dan akses terhadap pelayanan publik. Di sebagian besar masyarakat, perempuan cenderung bekerja lebih lama, mendapat upah lebih kecil, kurang mendapat prioritas di bidang pendidikan dan memiliki akses lebih terbatas untuk mendapat informasi dan kredit, serta sering tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Perempuan memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam keluarga dan masyarakat. Sayangnya, banyak yang tidak bisa memainkan peran dan fungsinya dengan baik karena faktor kemiskinan. Salah satu penyebab utama terjadinya kemiskinan ini adalah rendahnya tingkat pendidikan perempuan (Khayati, 2008:19-35)(Nurwati, 2008:1-10), akses informasi dan komunikasi yang rendah (Hastanti & Noya, 2018:38-56).

Pendidikan sangat penting untuk perempuan karena pendidikan pertama yang diberikan kepada anak ialah dari seorang ibu (Nadya, 2018:1-2). Oleh karena itu, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya harus didapatkan oleh seluruh penduduk termasuk perempuan agar diperoleh sumber daya manusia yang berkualitas (Hakiki, Gaib. Sugeng Supriyanto, Asinta Ulfah, Dwi Prastiwi, Widya Larasati, 2019:3-5).

Beberapa data menunjukkan mengenai ketimpangan gender yang terjadi di Indonesia, dapat diindikasikan sebagai faktor penyebab kemiskinan:

1. Kemampuan membaca dan menulis perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2018, sebanyak 93,99 persen perempuan usia 15 tahun ke atas mampu membaca dan menulis huruf latin, arab, atau lainnya, sedangkan persentase laki-laki lebih tinggi yaitu 97,33 persen (KPPPA, 2019:1-

- 12). *Gap* antara perempuan dan laki-laki dalam hal angka melek huruf ternyata hanya terjadi di Indonesia. Seperti yang dijelaskan Gallaway dan Bernasek (Gallaway & Bernasek, 2004:519-525) bahwa disparitas kemampuan membaca dan menulis serta peluang pendidikan antara perempuan dan laki-laki telah menjadi masalah kebijakan publik di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, meningkatkan kemampuan membaca dan menulis perempuan menjadi hal yang krusial.
2. Persentase perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir secara nasional pada tahun 2018 sebesar 32,58 persen atau sekitar tiga dari sepuluh perempuan mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir.
 3. Dalam bidang kesehatan, jumlah perempuan yang memiliki akses jaminan kesehatan adalah sebesar 64,47%.
 4. Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan Sakernas 2018 menunjukkan selisih yang cukup tinggi yaitu laki-laki sebesar 82,69% dan perempuan sebesar 51,88%.Persentase perempuan yang berstatus sebagai pekerja keluarga sebesar 22,57 persen, sedangkan persentase laki-laki sebagai pekerja keluarga cukup rendah, yaitu hanya 5,67 persen. Rasio upah yang berbeda disebabkan oleh kondisi antara buruh/ karyawan/pegawai perempuan dan laki-laki berdasarkan daerah tempat tinggal, tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan utamanya, dan status perkawinannya.
 5. Dalam bidang teknologi informasi yang semakin terjangkau dan memasyarakat, memudahkan kaum perempuan untuk terus belajar sepanjang hidupnya (*long life education*) tentang banyak hal tanpa terbatas waktu, jarak, dan juga usia.

Faktanya, Pengguna internet di Indonesia kini sebagian besar masih di dominasi oleh pria dengan persentase 53,17 persen. Sedangkan pengguna internet wanita mencapai 46,83 persen (KPPPA, 2019:1-12), Perempuan yang menggunakan telepon seluler sekitar 70,49% sementara laki-laki menggunakan HP (77,04 persen). Perempuan yang mengakses internet sebesar 37,49 persen sedangkan laki-laki sebesar 42,31 persen.

Terry (Terry & Gomez, 2010:1-17) menjabarkan beberapa hambatan yang menyebabkan banyak perempuan di negara-negara berkembang kesulitan untuk memperoleh akses dan memanfaatkan teknologi informasi karena masalah infrastruktur dan konektivitas, ketersediaan waktu dan biaya serta mayoritas masih mengutamakan peran sebagai ibu rumah tangga, yang waktunya banyak digunakan untuk mengurus anak dan keluarga.

Kemiskinan gender adalah hasil dari ketidaksetaraan kekuasaan gender, mengatasi kemiskinan pendapatan tidak akan serta merta meningkatkan kesetaraan gender tetapi kemajuan dalam kesetaraan gender dapat mengurangi kemiskinan. Gender dan kemiskinan sangat berkaitan erat dan kompleks (Bastos et al., 2009:764-778). Para ahli juga menyoroti sifat dinamis dari kemiskinan, dengan menggambar kemiskinan yang berkaitan dengan gender, diantaranya Bradshaw (Bradshaw et al., 2017:1667-1687) menyebutkan sebagai berikut :

1. 'Kemiskinan sementara' '*transitory poverty*'. Biasanya ini terjadi jika ada bencana, maka perempuan sangat merasakan keadaan dalam rumah tangganya dan mereka secara alami akan berusaha membantu ekonomi rumah tangga (kasus PHK suami dll).

2. 'Kemiskinan struktural' *Struktural poverty*'. Kemiskinan struktural itu akibat perlakuan yang tidak adil dimana gender menjadi alasan utama. Hal ini biasanya tercipta kepada mereka yang menganggap bahwa kedudukan kaum laki laki lebih utama dalam segala hal kemiskinan yang terjadi bukan dikarenakan ketidakmampuan si miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja dan ini banyak terjadi pada kaum perempuan.
3. Kemiskinan '*kronis*' (*chronic poverty*). Muncul dari posisi mereka dalam ketidaksetaraan sosial yang *tajam*. *subjektivitas pengalaman kemiskinan, jelas sulit untuk 'mengetahui' dan 'mengukur' kemiskinan gender*.
4. Kemiskinan sekunder: di antara perempuan dan anak-anak di rumah tangga '*tidak miskin*'. Kemiskinan dalam konteks ini bukan karena perempuan atau anak perempuan tidak memiliki harta atau kehidupan layak, namun posisi perempuan ada pada proses pengambilan keputusan atau kebijakan kebijakan dalam urusan rumah tangga.
5. Kemiskinan kekuasaan perempuan dan anak perempuan tidak mampu (karena takut akan kekerasan atau pengabaian) atau tidak mau (karena norma-norma gender yang tertanam kuat) untuk menentang atau menolak hak istimewa atau hak prerogatif pria. Akses, kontrol dan penggunaan asset dalam rumah tangga lebih di dominasi oleh kaum pria.
6. Kemiskinan waktu yaitu kemiskinan yang diidentikkan dengan pekerjaan pekerjaan yang bersifat domestik (dapur, kasur, sumur), dimana perempuan

sebagian besar hidupnya hanya mengurus kepentingan keluarga. Usia produktif perempuan biasanya lebih banyak dihabiskan dalam keluarga dibandingkan laki laki.

7. Kemiskinan pendapatan: kesempatan perempuan untuk bekerja dan meningkatkan kemampuannya serta ikut bersaing di dunia pekerjaan sering masih dianggap “*tabu*”. Pekerjaan rumah tangga cenderung tidak dalam perhitungan sebagai bagian menyelematkan sebagian ekonomi keluarga.

Penelitian lainnya juga menunjukkan hal sama seperti penelitian José Espinoza-Delgado (Espinoza-Delgado & Klasen, 2018:466-491) dengan judul *Gender and Multidimensional Poverty in Nicaragua: An Individual Based Approach*, menemukan bahwa di Nikaragua, kesenjangan gender dalam kemiskinan multidimensi lebih rendah dari 5%, dan kemiskinan tampaknya tidak feminin. Namun, ketimpangan di antara orang miskin multidimensial jelas-jelas feminin, terutama di kalangan orang dewasa, dan perempuan hidup dalam kemiskinan yang sangat kuat jika dibandingkan dengan laki-laki. Kemiskinan disebabkan faktor pekerjaan, pekerjaan rumah tangga, dan perlindungan sosial yang diukur berdasarkan kejadian, intensitas, dan ketidaksetaraan kemiskinan perempuan.

Penelitian Amélia Bastos (Bastos et al., 2009:764-778) dengan judul *Women and Poverty: A Gender-Sensitive Approach* dengan latar belakang potret kemiskinan di kalangan perempuan di Portugal menemukan ada beberapa hal antara lain: bahwa ibu yang sendirian atau kepala keluarga perempuan merupakan

kelompok yang sangat rentan terhadap kemiskinan dan ini disebabkan karena alokasi, pembagian, dan kontrol sumber daya dalam rumah tangga.

Perempuan tidak hanya menghadapi tingkat kemiskinan yang lebih tinggi daripada laki-laki, dengan tingkat kemiskinan di atas penduduk keseluruhan, tetapi mereka juga mengalami bentuk yang lebih intens dan parah. Perempuan lebih kekurangan dalam hal tingkat dan risiko kekurangan daripada laki-laki.

Beberapa solusi yang ditawarkan dalam penelitian tersebut yaitu pertama, penyebab dan pengalaman kemiskinan tidak netral gender, yang berarti bahwa laki-laki dan perempuan dapat terpapar kemiskinan dengan cara yang berbeda dan oleh faktor yang berbeda, yang karenanya memerlukan pendekatan sensitif gender untuk analisis.

Kedua, kemiskinan dipandang sebagai konsep multidimensi, karena tidak dipahami hanya dalam hal pendapatan yang tidak mencukupi, tetapi lebih sebagai perampasan di dalam wilayah-wilayah di mana perempuan, karena proses ekonomi dan sosial tertentu, dapat menemukan diri mereka dengan kesejahteraan. defisit dalam berbagai bidang kehidupan mereka.

Ketiga, diperlukan pendekatan dinamis untuk mengidentifikasi pola mobilitas atau kegigihan dalam kemiskinan baik untuk pria maupun wanita.

Selanjutnya penelitian Stefan Schütte (Schütte, 2014:1176-1192) dengan judul *Living with Patriarchy and Poverty: Women's Agency and the Spatialities of Gender Relations in Afghanistan*, menemukan kemiskinan kaum perempuan disebabkan oleh kekerasan dan penelantaran dalam rumah tangga, keterasingan dalam rumah baru setelah menikah, dan perjuangan untuk mendapatkan

penghasilan sangat ditentukan oleh asal mereka dan asal dari kota dan etnis memainkan peran yang menentukan hal tersebut.

Budaya patriarkhi dan norma yang berlaku menganggap perempuan yang menghabiskan banyak waktu di rumah dan lingkungan merupakan hal yang lebih baik untuk memahami tantangan dan kebutuhan penduduk. Mendengarkan suara perempuan memberi tahu kita sebaliknya dan memungkinkan untuk mengungkap bagaimana ketidaksetaraan gender dijelaskan dan ditantang dari perspektif perempuan.

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa gender dan kemiskinan menjadi suatu erat, kompleks dan dinamis. Ketimpangan dan ketidakadilan gender menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Menurut UNICEF (Cohen, D., Bhandari Karkara, N., Stewart, D., Rees, N., & Coffman, 2010:9-14) hal ini selain didasari oleh faktor budaya seperti patriarkhi juga pola penyelesaiannya tidak dalam konteks akar masalah dan hanya pada penyelesaian program.

Mengatasi masalah kemiskinan karena alasan gender juga harus diselesaikan dengan cara berdasarkan perspektif masing-masing, sehingga dapat menghasilkan program berkelanjutan yang dibutuhkan oleh kaum laki laki maupun kaum perempuan. Sebagai contoh, masalah kemiskinan karena pendidikan atau kesehatan maka hal itu akan dapat diselesaikan berdasarkan pokok masalah yang dialami oleh kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Kesetaraan gender diwujudkan ketika perempuan dan laki-laki menikmati hak, sumber daya, peluang dan perlindungan yang sama.

Struktur kekuasaan dalam masyarakat di seluruh dunia sebagian besar mengistimewakan anak laki-laki dan laki-laki, memajukan kesetaraan gender paling sering membutuhkan mengatasi kelemahan yang dihadapi anak perempuan dan perempuan. Pada saat yang sama, karena ketidaksetaraan jender meliputi hubungan dan institusi pribadi, keluarga dan sosial, itu juga memengaruhi laki-laki serta menuntut keterlibatan keduanya untuk membuat kemajuan menuju keadilan dan kesetaraan. Pergeseran dalam kesetaraan gender tidak hanya membutuhkan perubahan kesadaran dan perilaku, tetapi juga perubahan dalam dinamika kekuatan mendasar yang menentukan norma dan hubungan gender.

2.1.3 Pembangunan dan Pendidikan Perempuan

Pendidikan adalah pendorong utama pekerjaan dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Kekuatan efek pendidikan ini sangat bervariasi di setiap negara (Bussemakers et al., 2017:22-37) dan salah satu kegagalan yang sangat serius di dunia pendidikan dalam upaya global mengejar tujuan emansipasi (persamaan hak) adalah akses kaum perempuan di dunia pendidikan (D. T. I. R. M. Archer, 2006:39-41).

Berbagai masalah yang dihadapi dalam pembangunan yang berkaitan dengan kaum perempuan terutama dalam pendidikan. Sasaran program pemberdayaan perempuan atau *Empowerment of Women* diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan untuk memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki, serta untuk memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama terhadap sumber daya pembangunan. Dengan kondisi ini perempuan Indonesia akan dapat

mengembangkan kapasitas dirinya untuk aktualisasi perannya sebagai mitra sejajar laki-laki dalam pembangunan keluarga dan bangsa.

Perjuangan menuju kemandirian perempuan dan keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan baik diranah domestik maupun pada keputusan-keputusan publik sangat dipengaruhi oleh kemandirian dan kondisi ekonomi yang mereka miliki. Hal ini disebabkan ada pola ketergantungan perempuan terhadap kelangsungan kehidupannya pada laki-laki yang akhirnya berimplikasi pada dirinya sendiri yang sudah tentu akan menimbulkan kerugian terutama dalam peningkatan kemampuan maupun kebebasannya dalam melaksanakan kewajiban dan pemenuhan hak-haknya.

Oleh sebab itu upaya pembangunan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan merupakan upaya berkelanjutan yang sesuai dengan dinamika perubahan sosial-budaya atau ekonomi yang berlangsung secara cepat dalam era globalisasi. Upaya program peningkatan pengetahuan, keterampilan dan profesionalitas perempuan merupakan tuntutan masa depan yang tidak bisa dielakkan lagi. Untuk mengimbangi tantangan perkembangan jaman kemajuan dunia yang demikian cepat dan kompetitif diperlukan adanya perubahan paradigma dalam pembangunan peran perempuan.

Perubahan paradigma baru tersebut pada hakekatnya konsep pembangunan berwawasan gender. Konsep ini tidak hanya sekedar pembagian peran seadanya saja tetapi lebih dari itu yakni berusaha melakukan dan melaksanakan proses pembangunan dengan berdasarkan pembagian peran yang maksimal dan adil sehingga tidak ada lagi terjadi pembagian kesempatan yang lebih

banyak didominasi oleh kaum laki laki saja. Jalan ini diharapkan akan mampu menggerakkan perubahan cara pandang yang membangkitkan inspirasi dengan langkah strategis dan konkret dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas peranan perempuan Indonesia (Prantiasih, 2014:1-6).

Untuk mencapai target kesetaraan gender, kebijakan yang diambil harus berfokus pada mewujudkan persamaan akses pendidikan yang bermutu dan berwawasan gender bagi semua anak laki laki dan perempuan, pemberian kesempatan pendidikan gratis adalah langkah menurunkan tingkat buta huruf. Penurunan tingkat buta huruf juga meliputi penduduk dewasa terutama penduduk perempuan.

Langkah ini dapat ditempuh melalui pendidikan sekolah dan luar sekolah, pendidikan penyeteraan, serta pendidikan baca tulis fungsional bagi penduduk dewasa. Peningkatan kemampuan lembaga pendidikan dalam mengelola dan mempromosikan pendidikan yang berwawasan gender juga penting dilakukan untuk penguatan faktor eksternal. Selain itu juga melalui peningkatan koordinasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pengarusutamaan pendidikan berwawasan gender (Probosiwi, 2015:41-56).

Kemajuan suatu bangsa hanya bisa terjadi apabila semua elemen bangsa diberi akses yang adil untuk berkembang dan berkontribusi tanpa terkecuali. Akses yang adil bagi perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan ranah-ranah publik lainnya akan membuka kesempatan bagi perempuan untuk lebih berdaya dan berkontribusi pada kemajuan sebuah bangsa. Salah satu langkah untuk mewujudkan perempuan yang berdaya adalah memberikan layanan pendidikan

yang setara bagi para perempuan. Bukan hanya kesempatan memperoleh pendidikan, tapi juga pendidikan yang responsif gender, serta kesempatan untuk mengaktualisasikan diri sebagai buah dari pendidikan.

Selain itu peran perempuan sebagai ibu juga sangatlah besar, yang akan mendidik dan mengarahkan generasi penerus bangsa (anak) menjadi insan-insan yang membawa kemajuan bagi bangsa ini. Secara tidak langsung, masa depan bangsa ini juga tidak lepas dari kontribusi nyata perempuan dalam menyiapkan generasi-generasi emas. Perempuan turut serta dalam merancang, mengonsep, dan membangun kualitas putra-putrinya yang akan menjadi generasi penerus bangsa ini agar siap dalam membangun peradaban bangsa. Bisa disebut bahwa perempuan adalah arsitek bagi peradaban bangsa. Sebuah bangsa akan maju jika para perempuannya diberikan akses pendidikan yang setara dengan laki-laki (Zuhriyah, 2018:249-268).

Pemberdayaan menunjukkan bahwa masalah kemampuan atau kompetensi menjadi prasyarat bagi perempuan agar bisa aktif dalam pembangunan di tengah modernisasi. Ada tiga kebijakan khusus (*affirmative action*) sebagai langkah dalam mempersiapkan perempuan memasuki era modernisasi, yaitu: a. Pemberian keahlian dan pembekalan ketrampilan/ kompetensi tertentu (*expert-power*). b. Pemberian peluang dan peran (*role power*) c. Pemberian fasilitas untuk mewujudkan kemampuan (*resource power*).

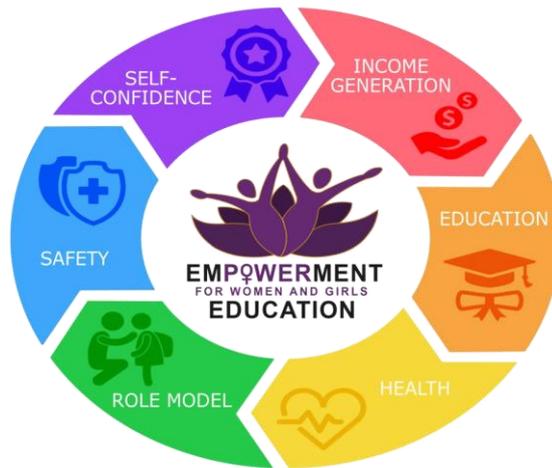
Persoalan perempuan menuntut suatu perhatian serius, karena terkait dengan berbagai konteks sosial budaya terutama masalah pendidikan yang melatarbelakanginya. Pendidikan, bagaimanapun, bermula dari keluarga, dan di

situ peran perempuan sebagai ibu sangatlah signifikan. Perempuan di era modern merupakan *stakeholder* pembangunan, karena itu pelaksanaan pembangunan harus menekankan pentingnya upaya pemberdayaan perempuan. Keterlibatan masyarakat perempuan untuk ikut memberikan masukan dalam perumusan serta pengawasan. Sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tanpa suatu penindasan dalam bentuk apapun (Ainiyah, 2017:97-109). Perempuan memiliki peran penting untuk mendewasakan anak-anak. Mereka sudah sewajarnya untuk dilengkapi dengan berbagai kemampuan terutama kemampuan pedagogis (Yuliati, 2016:121-134).

Di Indonesia perjuangan perempuan untuk memperoleh keadilan dalam pendidikan, hingga saat ini masih terus menghadapi kendala. Kendala ini akan terjadi selama alur hidup seorang perempuan dipengaruhi oleh perkembangan semangat dalam memperoleh pendidikan. Sampai saat ini masih ada masyarakat yang berkeyakinan bahwa perempuan hanya akan berperan dalam ruang domestik saja yakni rumah tangganya kelak, kemudian hanya dipandang sebagai makhluk pelengkap saja. Pandangan ini akan meminggirkan perempuan untuk memperoleh pendidikan.

Bentuk ketidakadilan lain yakni pelabelan negatif yang dilekatkan kepada perempuan dikenal dengan istilah *stereotype* (Mahfud, 2018:22-49). Oleh karena itu, menurut Sri Wahyuni (Wahyuni et al., 2017:48-71), perempuan harus memiliki kemampuan literasi agar mereka dapat berperan lebih jauh dalam melaksanakan kewajiban dan mengklaim hak-hak mereka sebagai perempuan dan warga negara Indonesia dan yang terpenting kaum perempuan berperan dalam pembangunan.

Dalam melaksanakan pembangunan khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan untuk pendidikan perempuan dan anak perempuan, maka ada beberapa hal yang harus menjadi titik perhatian (Gambar 1.3) yaitu: Pendidikan, kesehatan, ketokohan, kepercayaan diri, keamanan dan *income* perkapita.



GAMBAR 3 PEMBERDAYAAN UNTUK PENDIDIKAN PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN

Usaha suatu daerah bahkan negara dalam melaksanakan program pembangunan dengan memberikan pendekatan peningkatan pendidikan bagi kaum perempuan merupakan salah satu alternatif dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan sosial masyarakat.

Penelitian Sowmya Dhanaraj & Vidya Mahambare (Dhanaraj & Mahambare, 2019:17-29) yang bertema "Family Structure, Education and Women's Employment in Rural India", mendapatkan kesimpulan bahwa perempuan dengan pendidikan tinggi tidak dibatasi lagi oleh norma budaya dan tradisional, akan meningkatkan kekuatan pengambilan keputusan perempuan dalam keluarga secara bersama.

Tingkat pendidikan yang tinggi akan meningkatkan kapasitas penghasilan perempuan serta kualitas pekerjaan yang dapat membantu menurunkan tekanan keluarga terhadap pekerjaan. Kebijakan publik yang mendorong pendidikan tinggi, meningkatkan aksesibilitas pekerjaan bersama dengan perawatan anak yang terjangkau, akan meningkatkan lapangan kerja non-pertanian, yang semakin menjadi sumber utama pekerjaan baru, bagi perempuan yang tinggal di pedesaan India.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Shanika Samarakoon dan Rasyad A. Parinduri (Samarakoon & Parinduri, 2015:428-442) dengan tema *Does Education Empower Women? Evidence from Indonesia*, menemukan bahwa pengaruh pendidikan perempuan terhadap pembangunan antara lain mengarah kepada bagaimana perempuan dalam konteks penggunaan alat kontrasepsi mempengaruhi tingkat kehamilan bagi perempuan sehingga dengan kemampuan mengatur jarak kehamilan memungkinkan perempuan dapat memiliki waktu untuk melakukan hal hal lain selain mengurus anak dan rumah tangga. Perempuan yang lebih berpendidikan, juga berpengaruh terhadap anak-anak mereka terutama pada waktu disusui dan diimunisasi, yang mengurangi angka kekurangan gizi dan angka kematian anak.

Namun di Indonesia masih diatur oleh norma dan adat sehingga dalam penelitian ini belum menemukan hubungan antara pendidikan kaum perempuan dengan otoritas pengambilan keputusan, kepemilikan aset, dan partisipasi masyarakat (Samarakoon & Parinduri, 2015:428-442), dan tingginya partisipasi perempuan di dunia pendidikan belum diiringi dengan perubahan kultur yang

menunjukkan keseimbangan antara fungsi dan potensi laki-laki dan perempuan (Lilianti, 2017:36-46).

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang berhubungan dengan pendidikan perempuan memerlukan dukungan dan kebijakan antara lain: pendidikan perempuan harus lebih diefisienkan dengan memberikan tema pelajaran khusus yang berkaitan dengan kesetaraan gender mulai dari tingkat dasar karena ini berkaitan dengan konsep sensitifitas gender. Hal ini bertujuan agar sedini mungkin anak perempuan dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta peran apa saja yang akan dilakukan di masa depan mereka.

Pelibatan dan keterlibatan kaum perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada evaluasi sangat dibutuhkan untuk lebih mengoptimalkan peran mereka yang selama ini hanya menjadi subyek pembangunan.

Program pembangunan yang berkaitan dengan pendidikan perempuan harus diikuti dengan perubahan paradigma berfikir oleh seluruh komponen masyarakat sehingga ketimpangan yang terjadi antara kaum perempuan dan laki laki dapat dikurangi dan diganti dengan kolaborasi yang baik dalam pembangunan. Peran perempuan dalam rumah tangga tidak hanya sekedar mengasuh dan membesarkan anak tetapi juga harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan dan kepemilikan *asset*.

2.1.4 Perempuan dan Keluarga

Peranan kaum perempuan memiliki posisi yang sangat strategis dalam keluarga. Keberadaan kaum perempuan dalam rumah tangga selain sebagai

ibu juga sekaligus pusat peradaban manusia (Muhammad, 2014:231-244), arsitek utama bagi peradaban bangsa (Zuhriyah, 2018:241-268) yang dituntut untuk menyiapkan dan mempersembahkan generasi yang berkualitas (Harun AR, 2015:17-35) serta memberikan perlindungan terhadap keluarga dari berbagai informasi yang merusak persemaian tata nilai keluarga (Prantiasih, 2014:1-6).

Kaum perempuan yang memiliki kebaikan moral personal, kebaikan moral sosial, sehat secara fisik maupun mental, cerdas secara nalar dan memiliki kemampuan beraktualisasi diri dalam segala ruang, privat, domestik maupun publik akan mengantarkannya kepada posisi yang kuat dalam kehidupan keluarga. Kaum perempuan dengan tanggung jawab yang besar dalam kehidupan keluarga baik sebagai pendamping suami maupun pendidik dan pengayom anak anaknya. Oleh karena itu, menurut Ahmad Jajuli (Zuhriyah, 2018:249-268) bahwa kemajuan kaum perempuan itu harus ditopang dengan pendidikan yang baik, kesehatan yang prima serta tingkat akses yang luas diberbagai bidang terutama dalam bidang ekonomi.

Pada dasarnya ada tiga peran yang dapat dilakukan oleh kaum perempuan dalam kehidupan yaitu peran kodrati, peran domestik dan dan peran publik. Peran kodrati adalah peran yang tidak tergantikan seperti melahirkan dan menyusui anak. Disini peran sebagai ibu sangat besar karena berkaitan dengan dengan tumbuh kembang anak anaknya. Dalam posisi tersebut, kaum perempuan bukan hanya memberi air susu tetapi didalamnya ada proses penanaman nilai, kasih sayang, cinta dan norma. Keberadaannya sangat menentukan peran domestik adalah peran perempuan sebagai istri (pendamping suami), pengelola rumah tangga, sebagai ibu (penerus keturunan dan pendidik anak).

Peran Publik adalah keterlibatan perempuan di luar rumah menandakan bahwa perempuan telah berusaha merekonstruksi sejarah hidupnya dengan membangun identitas baru bagi dirinya, tidak hanya sebagai ibu atau istri, tapi juga sebagai pekerja dan perempuan karir maupun pekerja sosial. Keterlibatan perempuan dalam ruang publik sangat penting untuk menambah keterampilan, wawasan bahkan penghasilan. Sejarah membuktikan bahwa banyak kaum perempuan dapat sukses di ruang publik dalam berbagai bidang.

Peran- peran kaum perempuan tersebut diatas menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga Pasal 1 ayat 11 mendefinisikan kesejahteraan keluarga adalah:

“Kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik dan materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin”.

Titik fokus dalam undang undang ini secara implisit mengungkapkan bahwa kesejahteraan tidak bisa diukur hanya diukur dengan kemapanan dan keuangan yang memadai tetapi lebih dari itu ada unsur keuletan, ketangguhan, kemandirian dan pengembangan diri.

Selanjutnya, jika dihubungkan dengan posisi perempuan dalam keluarga maka jelaslah bahwa kaum perempuan harus menjadi pribadi yang ulet, tangguh, mandiri dan dapat mengembangkan dirinya. Mereka tidak boleh lagi identik dengan ruang domestik (kasur, dapur dan sumur) tetapi lebih dari itu, kaum perempuan harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karir yang baik. Peran

“*multitasking*” bisa dijadikan sebagai sebuah keniscayaan apalagi dengan kondisi perkembangan maupun tantangan yang semakin kompleks.

Telaah berikut ini, menampilkan kajian yang mengungkapkan peran kaum perempuan dalam keluarga, seperti Marlina Telaumbanua dengan judul *Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga* (Telaumbanua et al., 2018:418-436).

Dalam kajian ini lebih menitikberatkan bahwa peran ganda ibu dalam keluarga berdasarkan kajian literatur dan metode kritis. Kajian ini menyimpulkan bahwa ibu rumah tangga dapat berperan ganda untuk mengurus keluarga dan ikut serta dalam mencari nafkah. Secara umum alasan ibu rumah tangga bekerja adalah karena ingin membantu suami meningkatkan pendapatan keluarga. Sebagai tenaga kerja wanita dalam keluarga, umumnya mereka memilih bekerja di sektor informal. Hal ini dilakukan agar dapat membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Partisipasi wanita bukan lagi sekedar menuntut persamaan hak, tetapi juga menyatakan arti bagi pembangunan dalam menjamin kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi ibu rumah tangga.

Kajian lain dilakukan oleh Septi Latifa Hanum (Hanum, 2017:258-270) dengan judul *Peran Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga*. Kajian yang dilakukan dengan pendekatan hukum Islam menyimpulkan bahwa upaya untuk menyejahterakan keluarga tidak semata-mata bergantung pada kemampuan suami dalam mencari nafkah, tetapi juga ada peran istri yang secara bersama-sama membangun kesejahteraan keluarga dan semangat emansipasi tetap terjaga sesuai dengan prinsip ajaran Islam, supaya ajaran emansipasi ini tidak

kebablasan dan menjadi gerakan yang bersifat keagamaan dan menjunjung tinggi oleh etika umat Islam.

Selanjutnya penelitian Karina Christiansen (Christiansen et al., 2019:24-43) dengan judul *Work, Worksites, and Wellbeing Among North America Indian Women: a Qualitative Study*, menemukan tiga bentuk yang menonjol yaitu karakteristik struktural (konteks kehidupan pedesaan), penekan peran (peran ganda dan perempuan yang saling bertentangan) dan pengaruh dukungan sosial (sifat komunal perawatan dalam keluarga dan dukungan institusional di tempat kerja).

Hasil penelitian ini menemukan bahwa perempuan dalam komunitas pedesaan yang berpartisipasi sering bertindak sebagai ujung tombak utama bagi keluarga dekat dan keluarga besar, dan sering menempatkan kebutuhan orang lain di atas kepentingan mereka sendiri. Konteks kehidupan pedesaan, dengan tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan, dan penyakit kronis yang terkait dengan trauma kolonisasi kolektif, menempatkan perempuan pada posisi yang sangat penting. Dukungan sosial dari dalam tempat kerja, keluarga, dan tradisi budaya membantu perempuan menyeimbangkan tuntutan rumah dan pekerjaan.

Kajian dan penelitian diatas menunjukkan bahwa posisi perempuan sangat strategis dalam keluarga dengan berbagai posisi dan peran. Dukungan kebijakan, pandangan agama serta dukungan dari lingkungan kehidupan akan sangat membantu kaum perempuan dalam mewujudkan kesejahteraan dalam rumah tangganya.

2.1.5 Komunikasi Advokasi sebagai Pendampingan Program

Secara khusus, '*advokasi*' didefinisikan sebagai proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi keputusan dalam sistem dan institusi politik, ekonomi, dan sosial (Signorelli & Odone, 2015:737-747), yang tidak hanya berarti membela (*to defend*), melainkan juga mengemukakan atau memajukan (*to promote*), menciptakan (*to create*), dan melakukan perubahan (*to change*) (Topatimasang et al., 2016:226).

Advokasi juga diarahkan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan (Sprechmann & Pelton, 2001:43-52), merespon terhadap kondisi yang berlangsung (Rose & Bruce L. Black, 2002:57-69), dengan menggunakan metode, pendekatan, alat untuk mengubah kebijakan dan praktik lembaga reformasi, hubungan kekuasaan, serta sikap dan perilaku dan memberi dampak yang lebih luas bagi masyarakat (Coulby, 2010:5-9).

Definisi diatas menekankan bahwa, pertama, advokasi adalah proses mempengaruhi pembuat kebijakan, yang dimulai dengan prakonsepsi tentang "*bersikap konfrontatif*" dan "*meneriaki pemerintah.*" Ada berbagai pendekatan advokasi dapat dipilih, misalnya dengan pendekatan kepada publik atau pribadi, keterlibatan atau konfrontasi, dan bekerja sendiri atau berkoalisi dengan orang lain.

Pandangan ini biasanya menyorot kebijakan pemerintah yang tidak dilaksanakan ataupun kurang maksimal. Konfrontasi bukan satu satunya jalan yang dapat dilakukan untuk mengoreksi dan mengkritisi kebijakan tersebut, tetapi dengan pendekatan atau kolaborasi yang baik akan menemukan jalan dan solusi sehingga antara pemerintah dan masyarakat dapat memperoleh hasil yang diinginkan.

Kedua, advokasi adalah proses yang disengaja, oleh karena itu, sebelum menerapkan strategi advokasi, harus jelas siapa yang ingin dipengaruhi dan kebijakan apa yang ingin diubah. Proses ini bukanlah sesuatu yang “*instan*” dengan hanya menyelesaikan program, tetapi penting untuk mengetahui bahwa tujuan akhir yang akan dicapai itu dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua unsur yang terlibat. Selain itu, advokasi merespon kondisi obyektif, yang semuanya muncul dari kondisi kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagai contoh, banyak program pembangunan yang dilaksanakan tetapi tidak melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaannya apalagi sampai evaluasinya. Sehingga melalui advokasi, sebuah strategi yang jelas dan terarah akan memberikan masukan sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut.

Ketiga, para pembuat kebijakan (pemerintah), dapat membuat kebijakan yang bisa mengakomodir semua kepentingan dan keputusannya pun dapat diterima serta didukung oleh semua pihak. Penting untuk diingat bahwa arah kebijakan itu selalu untuk kepentingan manusia, bukan institusi. Advokasi digunakan untuk memengaruhi pilihan dan tindakan mereka yang membuat undang-undang dan peraturan, untuk kepentingan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat luas.

Sebuah keputusan atau kebijakan pada dasarnya memiliki landasan yang kuat baik dari sisi akademik maupun sosial, namun terkadang tidak mampu menyelesaikan masalah secara keseluruhan bahkan justru terkadang menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat sehingga membutuhkan komunikasi advokasi untuk menjembatannya. Oleh karena itu, peran komunikasi advokasi

cukup menentukan dalam memberikan masukan bahkan tekanan kepada pembuat keputusan untuk dapat mengakomodir kepentingan masyarakat.

Komunikasi advokasi yang dibangun dengan pendekatan kritis dalam bidang pembangunan, perubahan sosial dan gerakan sosial, dengan menggunakan strategi komunikasi untuk menawarkan wacana alternatif ke posisi dominan, memobilisasi tindakan melawan lembaga dominan, dan mempromosikan perubahan struktural yang normatif. Advokasi memusatkan perhatian pada program-program strategis yang berupaya mengubah kebijakan melalui memobilisasi dukungan langsung dari masyarakat.

Servaes dan Malikhao (Servaes & Malikhao, 2012:229-243) menggambarkan advokasi sebagai '*istilah kunci dalam wacana pembangunan*', yang bertujuan untuk mendorong kebijakan publik yang mendukung solusi dari suatu masalah atau program' serta digunakan untuk pengenalan masalah dan solusi potensial bagi yang terlibat dalam upaya kolektif, dengan sasaran adalah publik atau pembuat kebijakan. Selain mendidik dan memobilisasi, komunikasi dapat berfungsi sebagai tempat di mana kelompok-kelompok menggali interpretasi masalah dan solusi yang diajukan.

Komunikasi advokasi memberikan potensi untuk bernegosiasi dan bekerja menuju perubahan kondisi untuk kepentingan publik. Salah satu bagian menarik menuju perubahan adalah dengan mengenali dinamika gender dan menariknya pada program-program yang mempromosikan perubahan kebijakan dan sikap melalui komunikasi advokasi (Wilkins, 2014a:44-65).

Komunikasi advokasi yang baik bukan hanya sekedar pelaksanaan program dan menyelesaikan laporan program tapi harus berkelanjutan mulai dari perencanaan dan masuk, proses, hasil dan dampak (*input, process, output and impact*) dimana seluruh *stakeholders* terlibat dalam merumuskan dan melaksanakannya. Begitu banyak masalah yang dihadapi membutuhkan strategi advokasi yang komprehensif dan yang terpenting adalah sejauhmana masyarakat dapat mengikuti sampai menjabarkannya bahkan dapat menjadi agen agen perubahan yang baru, yang lahir dari komunitas masyarakat itu sendiri.

Program apapun yang dilaksanakan tidak akan memberikan hasil yang maksimal jika itu tidak dibangun atas kesadaran kolektif dari masyarakat untuk melakukan perubahan. Sebagai sebuah ilustrasi bahwa begitu banyak program yang ditawarkan oleh pemerintah dan LSM tetapi tidak mampu berlanjut dan biasa hanya terhenti setelah program itu selesai. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat, kemudian kurangnya sumber daya manusia yang mampu mendampingi dengan baik dan tidak adanya dukungan pemerintah baik dari sisi kebijakan maupun penganggaran.

Pelaksanaan advokasi lebih berorientasi pada masalah serta berfokus pada kondisi obyektif, yang semuanya muncul dari kondisi kehidupan masyarakat sehari hari. Banyak diantara masyarakat hidup dalam kondisi memprihatinkan dan tidak mampu keluar dari masalah yang melingkupinya sehingga konsep advokasi dapat menjadi jalan keluar untuk mengetahui bentuk permasalahan serta cara pendampingannya.

Dalam konteks ini, advokasi dan pemberdayaan menjadi kata kunci karena advokasi bergantung pada pemberdayaan untuk substansi dan validitasnya sementara pemberdayaan bergantung pada advokasi untuk pemberlakuan transpersonal, masalah dan arah substantifnya. Advokasi memerlukan aksi nyata dalam bentuk tindakan lapangan dan dialog walaupun itu bisa merugikan ataupun membantu sebuah program perlu diberlakukan karena pada dasarnya tidak semua program atau kegiatan yang berkaitan dengan sebuah kebijakan itu bisa berdampak menyeluruh. Upaya-upaya yang bertujuan untuk menginformasikan atau memengaruhi perilaku dalam audiensi yang besar dalam periode waktu tertentu menggunakan serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisir dan menampilkan serangkaian pesan yang dimediasi dalam berbagai saluran umumnya untuk menghasilkan manfaat nonkomersial bagi individu dan masyarakat.

Berbagai konflik kepentingan minimal atas nama kepentingan yang dirasakan dari orang atau kelompok yang kurang beruntung. Advokasi memiliki peranan untuk mempromosikan, melindungi dan mempertahankan kesejahteraan dan keadilan mereka, tentunya dengan berada di pihak mereka. Banyak orang, atau kelompok bahkan pemerintah sekalipun kurang peduli dengan kebutuhan mendasar mereka, padahal di satu sisi hal ini merupakan bertanggung jawab bersama kepada mereka untuk memberikan rasa keadilan serta bantuan dalam memecahkan solusi dari setiap persoalan yang masyarakat hadapi. Kaitannya dengan advokasi, dibutuhkan cara yang tegas dan kuat walau berkonsekuensi untuk kelompok yang terlibat dalam advokasi karena berafiliasi dengan dana, waktu, pikiran dan tenaga.

Advokasi sebagai proses bersifat universal, lintas topik dan tempat. Ini menggunakan kerangka kerja sistematis dan prinsip-prinsip strategis fundamental yang dikembangkan selama setengah abad terakhir. Perancang kampanye advokasi melakukan analisis situasional dan menetapkan tujuan yang mengarah pada pengembangan serangkaian strategi yang koheren dan mengimplementasikannya dengan membuat pesan informasi dan persuasif yang disebarluaskan melalui media massa tradisional, teknologi baru, dan jaringan interpersonal (Ndonye, 2014:40-53).

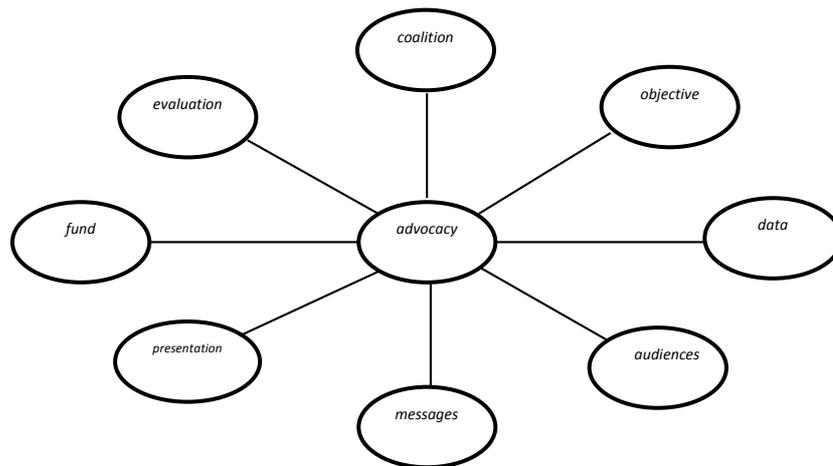
Reyes menekankan bahwa advokasi merupakan strategi yang ditujukan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang diperkirakan merugikan masyarakat (Cangara, 2017:86-89) serta kemampuan mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai macam bentuk komunikasi persuasif. Kebijakan publik termasuk pernyataan, kebijakan atau penetapan sebuah gerakan yang ditentukan oleh pihak yang berwenang untuk membimbing atau mengendalikan perilaku lembaga, masyarakat dan individu. Selain itu, advokasi membantu pemecahan masalah kelompok dengan mengidentifikasi posisi alternatif dan menambah pengetahuan tentang isu-isu penting yang harus dipecahkan (O'Hair et al., 2009:5-9).

Dengan demikian, advokasi menurut Mehra (Mehra, 2007:2-7) dapat dipahami sebagai suatu strategi yang dirancang dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah yang disertai dengan tindakan dan solusi dalam menciptakan perubahan bagi masyarakat dan lingkungannya. Dalam konteks ini, advokasi faktor kekuatan

terutama bagi kelompok masyarakat yang menjadi targetnya dan terpenting pula adalah tujuan yang jelas yang menjadi bagian yang akan dikampanyekan.

Advokasi paling efektif ketika individu, kelompok, dan semua kelompok masyarakat dilibatkan, melalui tiga strategi aksi yang saling terkait yaitu: menghasilkan komitmen politik, dukungan sosial dan pemberdayaan (Servaes & Malikhao, 2012:229-243).

Advokasi memiliki elemen elemen yang dijadikan sebagai suatu strategi untuk membangun dasar pelaksanaannya. Elemen tersebut dapat dilihat (digambar 1.4) berikut ini:



GAMBAR 4 THE BASIC ELEMENT OF ADVOCACY

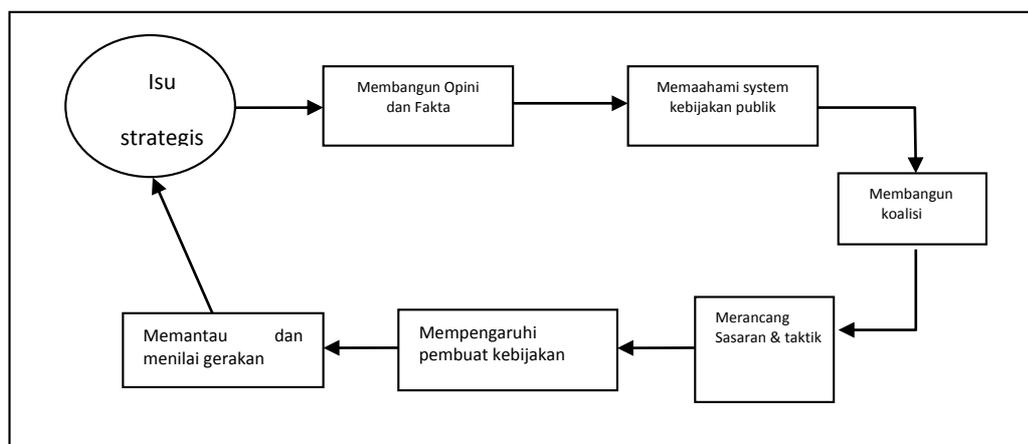
Konsep yang dikembangkan Sharma (Sharma, 1999:5-7) menjelaskan bahwa dalam advokasi memiliki beberapa unsur yang harus menjadi perhatian yaitu:

1. *Obyektif*, yaitu tujuan advokasi. Mengingat begitu banyak permasalahan yang membutuhkan kebijakan maka dalam proses advokasi membutuhkan prioritas yang harus diperjuang agar tujuan dapat diraih semaksimal mungkin.
2. *Data*, sebagai sumber informasi untuk merencanakan, melaksanakan, mengidentifikasi dan mencari solusi yang dibutuhkan.
3. *Audiens*, atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran advokasi. kelompok masyarakat ini sangat penting karena merupakan advokasi dan tentunya yang berkaitan dengan pengaruhnya terhadap pembuat keputusan.
4. *Pesan*. Dalam kegiatan advokasi pesan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman kelompok yang akan diadvokasi.
5. *Koalisi*. Pelaksanaan kegiatan advokasi memerlukan dukungan berbagai elemen untuk mencapai tujuan.

6. *Persuasif*. Pendekatan persuasif adalah bentuk pendekatan yang mengandalkan ketepatan argument, kecermatan dan ketelitian sehingga *audiens* dapat tertarik dan mengubah peluang menjadi lebih baik.
7. *Dana*. Dana merupakan sumber daya utama dalam pelaksanaan advokasi mengingat pelaksanaannya yang jangka panjang dan menyita energi.
8. *Evaluasi*. Evaluasi adalah upaya untuk menentukan menilai program, memberikan informasi, menindaklanjuti program serta menemukan solusi (Sharma, 2020:14-20).

Pelaksanaan advokasi memerlukan pedoman dalam merancang advokasi yang sukses, yaitu: Pertama, *Realistis*. Advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas dan terukur (*measurable*), realistis dan dapat dicapai (*achievable*) dalam kurun waktu tertentu (*time-bound*).

Kedua, *Sistematis*. Advokasi adalah seni, yang harus dikemas semenarik mungkin dan melibatkan *stakeholders* yang memeberikan peran maksimal serta penggunaan media secara efektif.



GAMBAR 5 PROSES ADVOKASI (DUBOIS, BREDA AND KARLA KRAGRO MILEY (2005)

Seperti ditunjukkan Gambar 1.5, proses advokasi dapat dimulai dengan memilih dan mendefinisikan isu strategis, membangun opini dan mendukungnya dengan fakta, memahami sistem kebijakan publik, membangun koalisi, merancang sasaran dan taktik, mempengaruhi pembuat kebijakan, dan memantau serta menilai gerakan atau program yang dilakukan.

Ketiga, *taktis*. Dalam advokasi dibutuhkan kerjasama atau koalisi dengan kesamaan kepentingan dan saling percaya (*trust*). Koalisi harus menjadi penggagas, membangun opini dan fakta, memahami sistem kebijakan publik, serta memilih isu strategis membangun koalisi merancang sasaran dan taktik sehingga mampu mempengaruhi pembuat kebijakan sekaligus memantau & menilai gerakan (Suharto, 2006:1-8).

Komponen selanjutnya adalah menyangkut tujuan kegiatan advokasi yakni: *political comitment, policy support, sosial acceptance and sytem support* (Notoatmodjo, 2012:84-97). Komitmen Politik (*Political Comitment*), menyangkut pemahaman pemerintah baik eksekutif maupun legislatif terhadap masalah-masalah masyarakat. Komitmen politik akan berimplikasi kepada suatu kebijakan dan kebijakan tersebut akan menjadi hal yang mendasar dalam pelaksanaan suatu program.

Di Indonesia, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan akan terkait dengan dua unsur yakni eksekutif dalam hal ini pemerintah dan legislatif dalam hal ini wakil rakyat baik di dewan perwakilan rakyat pusat maupun di daerah. Untuk itu, advokasi terhadap kedua lembaga ini harus kuat dan terarah terutama dalam meyakinkan mereka mengenai pentingnya suatu program atau kebijakan

yang akan dilaksanakan maupun di evaluasi. Walaupun pekerjaan ini tidak mudah karena biasanya akan berdampak sejauh mana “*kepentingan*” lembaga tersebut terhadap program yang akan diadvokasi.

Dukungan Kebijakan (*Policy Support*) adalah dukungan konkrit yang diberikan oleh para pimpinan institusi di semua tingkat dan sektor yang terkait pembangunan. Dalam konteks ini, penjabaran program terutama yang dituangkan dalam bentuk program kerja yang akan dilaksanakan oleh institusi baik itu pemerintah maupun lembaga lembaga non pemerintah yang punya keterkaitan dengan program advokasi yang dilaksanakan. Dukungan kebijakan akan sangat menentukan tingkat keberhasilan program advokasi yang dilaksanakan.

Hal ini tentu didasari bahwa apa yang diadvokasi juga berkaitan dengan kebijakan yang dilaksanakan terutama oleh pemerintah. Banyak hal yang dijumpai bahwa terkadang apa yang diprogramkan oleh pemerintah bukan untuk kepentingan maupun kebutuhan prioritas masyarakat tetapi hanya sekedar menyelesaikan pekerjaan. Begitupun sebaliknya, terkadang masyarakat merasa bahwa apa yang mereka butuhkan pasti pemerintah akan melaksanakannya karena ada prosedur perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dan sudah disepakati.

Dukungan Masyarakat (*Sosial Acceptance*) adalah kegiatan penerimaan suatu program oleh masyarakat. Suatu program tidak akan berjalan maksimal bahkan gagal, jika masyarakat yang menjadi sasaran program tidak mendukung bahkan terlibat. Ini biasanya terjadi jika masyarakat tidak merasa memiliki program atau program itu dianggap tidak tersosialisasi dengan baik. Mengadvokasi masyarakat bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, apalagi jika yang

melaksanakannya adalah lembaga atau institusi di luar masyarakat itu sendiri. Sikap mencurigai, memusuhi bahkan penolakan sering muncul jika masyarakat menganggap itu dapat mengganggu kestabilan daerah mereka dan bisa mengganggu hubungan antar warga maupun dengan pemerintah.

Dukungan Sistem (*Support system*) adalah dukungan sistem, mekanisme, atau prosedur kerja yang jelas terhadap suatu program agar berjalan dengan baik. Pelaksanaan advokasi memerlukan waktu yang panjang dan terukur. Untuk itu, sistem, mekanisme atau prosedur kerja sangat penting untuk dimatangkan dan dijadikan pola dalam pelaksanaan kegiatan. Suatu sistem yang baik apabila dapat mewujudkan hasil yang ingin dicapai, dan sistem yang baik juga biasanya dapat dilakukan secara elastis sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat yang dihadapi. Begitupun sebaliknya, suatu sistem yang kaku akan mempengaruhi bahkan mempersulit hasil yang ingin dicapai.

Salah bagian terpenting dalam advokasi adalah komunikasi. Komunikasi mencakup berbagai metode termasuk melobi, kerja media, kampanye populer, dan mengubah sikap publik, intinya adalah berupaya meningkatkan kekuatan orang dan kelompok dan membuat lembaga lebih responsif terhadap kebutuhan manusia (Wallack dalam (Servaes & Malikhao, 2012:229-243)

Advokasi komunikasi adalah tentang mempengaruhi dan membujuk individu dan institusi untuk berubah. Sederhananya, ini tidak akan terjadi kecuali program dapat yang direncanakan dapat mengkomunikasikan ide dan proposal secara efektif. Komunikasi advokasi yang baik membutuhkan banyak elemen dan keterampilan yang sama yang harus digunakan dalam semua pekerjaan komunikasi.

Namun, komunikasi untuk tujuan advokasi tidak sama dengan praktik komunikasi yang lebih umum, seperti buletin, materi penggalangan dana, atau informasi umum tentang program yang dilaksanakan. Meskipun beberapa alat dapat digunakan untuk menyebarkan pesan advokasi yang dibuat, komunikasi advokasi masih merupakan sesuatu yang lebih spesifik daripada sekadar komunikasi.

Komunikasi advokasi adalah proses yang dinamis, sehingga tidak ada resep tunggal untuk sukses. Sebagian besar komunikasi advokasi memiliki elemen-elemen berikut: Pengaturan sasaran (satu/beberapa sasaran yang berubah-ubah). Seperti diketahui bersama bahwa dalam melaksanakan advokasi terkadang lain yang direncanakan lain pula kondisi yang dihadapi. Kondisi dan situasi masyarakat tentu akan berbeda beda dalam menghadapi suatu program. Oleh karena itu peran komunikasi untuk mengatur sasaran yang dituju cukup penting. Peran komunikator dalam menyampaikan pesan (dalam hal ini program) kepada masyarakat sasaran akan sangat ditentukan sejauhmana pengolahan pesan itu dibuat. Ini menyangkut kajian efektifitas pesan, dan tingkat penerimaan oleh masyarakat sehingga program dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

Mengumpulkan kebijakan dan informasi politik; Program advokasi juga ditentukan oleh seberapa banyak informasi yang didapat dan dikumpulkan. Sebuah program yang mengarah kepada koreksi terhadap sebuah kebijakan akan sangat efektif jika didukung oleh informasi politik dan kebijakan yang dimiliki. Hal ini bertujuan agar ketika terjadi lobi dan diskusi bahkan perdebatan, ada dasar yang dimiliki untuk dijadikan alasan dan pedoman mempertahankannya. Namun jika

tidak memilikinya justru akan menjadi umpan balik yang dapat menggagalkan program yang diadvokasi.

Menilai resiko (misalnya, lawan); Kegiatan advokasi juga menuntut adanya strategi menilai resiko yang akan dihadapi. Perhitungan terhadap dampak dari sebuah program yang diadvokasi akan jauh lebih baik dibandingkan hanya sekedar adu argumentasi. Dalam mengadvokasi program yang berkaitan dengan koreksi terhadap sebuah kebijakan, maka akan berhadapan dengan sebuah aturan yang memayunginya serta banyak juga kepentingan yang dibelakangnya. “*Lawan*” akan selalu punya celah yang dapat dijadikan sebagai bahan dan dasar argumentasi untuk mempertahankan diri. Jadi sangat penting punya dasar dan acuan yang baik terutama dalam menilai resiko yang akan dihadapi.

Membangun hubungan strategis; kegiatan advokasi akan menentukan jika hubungan hubungan dibangun terutama terhadap *stakeholders* yang memiliki posisi strategis. Pelaksanaan advokasi tentu tidak berdiri sendiri dan melibatkan banyak pihak sehingga perlu dibangun sinergi antar pihak. Ini bertujuan untuk memudahkan kerja program yang dilaksanakan dan dapat meningkatkan peran peran masyarakat yang terlibat karena memiliki kekuatan hubungan yang baik. Membangun hubungan sangat ditentukan oleh bentuk dan model komunikasi yang dibuat. Komunikasi memiliki peran sangat signifikan karena pertimbangan posisi yang berbeda beda dari setiap pihak yang tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda.

Membangun kredibilitas, kepercayaan atau kredibilitas dalam advokasi merupakan hal yang tidak bisa dikesampingkan. Program akan mudah dilaksanakan

jika kredibilitas bisa dijaga. Masyarakat sangat mudah terpengaruh apalagi jika sudah timbul ketidakpercayaan. Membangun kredibilitas bukan hanya dari sisi program tetapi juga berkaitan dengan pelaksana baik itu secara individu maupun kelompoknya. Program yang baik jika tidak didukung oleh individu yang memiliki kredibilitas yang baik akan sangat sulit terlaksana karena masyarakat akan melihat dan mencerna bahkan memberikan penilaian antara program dan individu dalam satu kesatuan.

Menghubungkan advokasi dengan prioritas. Pelaksanaan program pada dasarnya memiliki tujuan dan konsep pelaksanaan yang ideal. Dalam advokasi, proses sangat menentukan tujuan yang ingin dicapai. Ada skala prioritas yang ingin diselesaikan disamping prioritas-prioritas yang lain. Kondisi dan situasi dalam masyarakat akan memberikan pilihan prioritas yang akan dilaksanakan yang tentu tidak mempengaruhi arah yang diharapkan.

Mempertahankan fokus. Fokus menjadi hal yang utama dalam pelaksanaan advokasi. Banyaknya hambatan dan tantangan bahkan adanya kelemahan dan kekurangan metode yang dimiliki tidak menjadikan kegiatan kehilangan fokus. Hal ini harus diantisipasi untuk menjaga segala kemungkinan yang bisa mencapai tujuan akibat kegagalan fokus. Advokasi membutuhkan upaya jangka panjang dan berkelanjutan, ini bukan kejadian sekali saja (Health Action International, 2019:5-12).

Dalam kegiatan advokasi komunikasi, fokusnya adalah memengaruhi audiens tertentu dan menggunakan pesan tertentu untuk menyampaikan perubahan kebijakan atau praktik. Secara umum, komunikasi advokasi yang sukses harus

memperhatikan unsur- unsur yaitu tujuan, pengetahuan, bahasa dan pesan. Tujuan sangat penting untuk dirumuskan dengan baik dalam menuntun kemana arah yang akan dicapai.

Tujuan ini harus pula dibarengi dengan pengetahuan tentang *audiens*/ masyarakat sasaran. Kondisi masyarakat yang berbeda-beda baik dari segi pendidikan, adat dan budaya, karakter, dan lainnya akan membantu proses advokasi. Membuat sebuah program ditengah masyarakat dengan tujuan mengubah cara berfikir atau mempengaruhi untuk sebuah hal baru bukan pekerjaan mudah. Faktor bahasa yang sesuai menentukan dalam komunikasi advokasi salah satunya adalah penggunaan bahasa. Perlu ada pengetahuan bahasa lokal selain bahasa ibu yang digunakan. Pendekatan dengan bahasa yang tepat akan memudahkan menggali informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah isi pesan dan informasi yang pendek dan spesifik. Dalam advokasi sebaiknya dihindari pesan yang panjang dengan penjelasan bertele tele mengingat kemampuan keompok sasaran biasanya membutuhkan penjelaan singkat dan mudah dipahami.

Sejalan dengan pengertian di atas, maka advokasi yang dimaksud disini adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai macam bentuk komunikasi persuasif. Kebijakan publik termasuk pernyataan, kebijakan, atau penetapan sebuah gerakan yang ditentukan oleh pihak yang berwenang untuk membimbing atau mengendalikan perilaku lembaga, masyarakat, dan individu.

Model perencanaan komunikasi untuk advokasi terdiri atas enam tahapan, yakni: Analisis, Strategi, Mobilisasi, Aksi, Evaluasi, dan Kesenambungan.

1. Analisis, merupakan langkah pertama untuk melaksanakan advokasi yang efektif, sebagaimana halnya langkah awal pada setiap aksi. Upaya kegiatan advokasi yang dirancang agar bisa berdampak pada kebijakan publik diawali dengan ketersediaan informasi yang akurat dan pemahaman mendalam tentang permasalahan yang ada, masyarakat yang terlibat, kebijakan serta keberadaannya, organisasi-organisasi, dan jalur-jalur yang dapat menjadi akses untuk mempengaruhi tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan para pengambil keputusan. Semakin kuat dasar pengetahuan elemen tersebut, semakin meyakinkan advokasi yang dilakukan.
2. Strategi, setiap usaha advokasi memerlukan strategi. Tahapan strategi dibangun berdasarkan tahapan analisis yang mengarahkan, merencanakan, dan memfokuskan upaya pada tujuan khusus, serta menempatkannya pada jalur yang jelas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.
3. Mobilisasi, pembentukan koalisi untuk memperkuat advokasi. Peristiwa, kegiatan, pesan, dan materi pendukung harus dirancang sesuai dengan tujuan, kelompok sasaran, kemitraan, dan sumber-sumber yang ada. Kesemuanya ini harus memberi dampak positif yang maksimum bagi pembuat kebijakan dan partisipasi penuh dari semua anggota selain memperkecil kelompok oposisi.
4. Aksi, mempertahankan kekompakan kegiatan aksi dan semua mitra merupakan hal yang mendasar dalam pelaksanaan advokasi. Pengulangan pesan dan penggunaan alat bantu yang kredibel yang dibuat secara berulang sangat membantu untuk dapat mempertahankan perhatian terhadap isu yang ada.

5. Evaluasi, usaha advokasi harus dievaluasi secara seksama sebagaimana halnya dengan kegiatan kampanye lainnya. Karena kegiatan advokasi sering membuahkan hasil yang parsial. Tim advokasi perlu memonitor secara rutin dan objektif apa yang telah dicapai dan apa yang masih harus dikerjakan. Proses evaluasi bisa lebih penting dan lebih sulit daripada dampak evaluasi.
6. Kesenambungan, seperti halnya komunikasi, advokasi adalah sebuah proses yang berlangsung terus menerus. Bukan sekadar sebuah kebijakan atau peraturan. Perencanaan terhadap kesinambungan berarti memperjelas tujuan jangka panjang, mempertahankan keutuhan fungsi koalisi, dan menyesuaikan data argumentasi, seiring dengan perubahan yang terjadi.

Adapun tujuan secara umum dalam advokasi komunikasi adalah untuk membangun pendekatan strategis dan dialogis secara struktural independen, dan berbasis empiris dalam meningkatkan kesejahteraan manusia (Wilkins, 2014a:47-63).

Dalam pelaksanaan advokasi, dibutuhkan perencanaan serta alur pelaksanaan yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan kegiatan yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai memiliki langkah yang jelas dan tepat.

Pengembangan hasil penelitian, artikel ilmiah serta laporan laporan lembaga swadaya masyarakat tentang peran komunikasi advokasi dilakukan dalam mengkaji pelaksanaan program pembangunan dan masalahnya seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan lainnya, khususnya bagi kaum perempuan dengan model pendampingan program.

Kajian mengenai pendampingan program diteliti oleh Weinstein (Weinstein, 2019:100-134) dengan judul *Women 's Empowerment as a Policy for Poverty Reduction in Haiti*. Penelitian ini mengkaji peran LSM Diaspora LSM (DILSM) yang terlibat dalam perjuangan untuk mengurangi kemiskinan di Haiti dengan pendampingan program pemberdayaan untuk membantu perempuan menjadi mandiri.

Hasil menunjukkan bahwa kaum perempuan merasakan kekuatan pendidikan dalam pemberdayaan perempuan, yang dimanfaatkan untuk penggalangan dana dan berkolaborasi dengan organisasi lain dan pemerintah. Melalui peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, Haiti dapat memperbaiki kekurangannya dan mencapai ekonomi yang lebih berkelanjutan serta memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk menghasilkan perubahan sosial yang positif.

Kemudian penelitian Signorelli, (Signorelli & Odone, 2015:737-747) dengan judul *Advocacy Communication, Vaccines and the Role of Scientific Societies*. Penelitian ini mengkaji peran *The Italian Society of Hygiene* dan masyarakat ilmiah Italia dengan pendekatan komunikasi advokasi dalam promosi kesehatan masyarakat untuk kasus imunisasi, yang tingkat cakupannya menurun di banyak negara, terutama di Italia. Menurutnya tindakan advokasi yang efektif dapat menangkal fenomena keragu-raguan vaksin yang berkembang di dalam masyarakat. Disini dihasilkan sajian model komprehensif untuk komunikasi advokasi yaitu payung advokasi kesehatan masyarakat. Teknik dan strategi komunikasi advokasi yang diterapkan di sektor-sektor lain menawarkan potensi

besar bagi kesehatan masyarakat dan dapat berhasil diterapkan pada budaya pencegahan penyakit dimana peran masyarakat ilmiah sangat utama.

Strategi komunikasi advokasi yang efektif menurut Signorelli (Signorelli & Odone, 2015:737-747) harus adalah kemampuan dalam menyederhanakan pesan sehingga audiens dapat menerima dengan baik. Terjadi kesepahaman antara sumber dan penerima pesan akan memudahkan kegiatan advokasi dalam mencapai tujuan. Strategi ini pun harus dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang disesuaikan dengan bahasa “*emosional*” masyarakat sasaran sehingga pesan yang diinformasikan sesuai dengan karakter mereka. Kemudian, pelibatan tokoh panutan akan memudahkan untuk memobilisir masyarakat sesuai dengan target advokasi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ankita R. Brahmbhatt dan Pinakin Sheth (Ankita & Sheth, 2013:23-34) dengan tema *The Role Of NGOs In Empowering Women- An Empirical Study Of The Selected NGOs Of India*, yang mengkaji kegiatan lima LSM dengan program pendampingan berkaitan dengan pemberdayaan program yaitu *Bochasanwasi Shri Akshar Purshottam Swaminarayan Sanstha (BAPS)* di Gujarat, *Sakaar Outreach* di New Delhi, *Sadhna* di Rajasthan, *All India Women's Conference (AIWC)* di West Bengal, dan *Yashashvini Group* di Maharashtra.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dampak signifikan dari LSM (*NGOs*) terhadap kaum perempuan di daerah terpilih. Setelah bergabung dengan organisasi, perubahan drastis terlihat dalam gaya hidup perempuan, mereka sudah mulai menghasilkan uang, menjadi mandiri dan termotivasi diri. Mereka dapat mengambil keputusan sendiri dalam beberapa hal dan memberikan saran dalam

masalah keluarga. Begitu pendampingan yang di lakukan untuk implementasi langkah-langkah intervensi di bidang kesehatan dan untuk meningkatkan tingkat melek huruf perempuan menunjukkan hasil yang baik.

Penelitian Suharko (Suharko, 2007: 2-20) yang berjudul *The Roles of NGOs in Rural Poverty Reduction: The Case of Indonesia and India*, mengkaji kegiatan dua LSM di dua negara mengenai pengentasan kemiskinan desa dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Di India, LSM Gram Vikas telah bekerja di Negara Bagian Orissa membentuk *Young Students Movement for Development (YSMD)* atau Gerakan Siswa Muda untuk Pembangunan yang berkomitmen untuk perubahan sosial di tingkat regional dan nasional.

LSM ini mengklaim bahwa mereka hanya percaya pada dua pihak - '*yang*' dan '*yang tidak*', dan misinya adalah mengubah '*tidak*' menjadi '*milik*.' Untuk mencapai misinya. Gram Vikas merumuskan strategi pengembangan yang ringkas, yaitu proses MANTRA yakni *Movement and Action Network for Transformation of Rural Areas* atau Gerakan dan Jaringan Aksi untuk Transformasi Wilayah Pedesaan, dengan didasarkan pada beberapa nilai inti: inklusi, keadilan sosial dan gender, keberlanjutan dan pembagian biaya.

LSM kedua yang bekerja di Indonesia adalah Bina Swadaya yang LSM besar dan mapan di Indonesia. Lembaga ini berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, memperkuat institusi lokal, menyediakan layanan keuangan mikro, dan menjual serta mendistribusikan berbagai informasi dan produk serta aktif mengadvokasi peningkatan standar hidup akar rumput. Bina Swadaya memberikan layanan kepada masyarakat melalui dua kegiatan utama. Yang pertama adalah

menyediakan layanan untuk memberdayakan masyarakat dan kedua mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan, pusat penelitian, dan lembaga konsultasi.

Dua kasus LSM telah secara intensif terlibat dalam pengurangan dan pengentasan kemiskinan dan memiliki kinerja yang cukup baik. Kondisi orang miskin telah membaik, kadang-kadang cukup signifikan, sebagai hasil dari intervensi LSM. pengalaman yang berharga dan dalam pengembangan kapasitas organisasi, memungkinkan keduanya memiliki kontribusi yang besar terhadap pengurangan kemiskinan di masa depan.

Hasil kajian Wahyu Nurharyati A.Nelson Aritonang dan Aribowo (Nurharyati, 2017:312-323), judul Advokasi Program Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin Di Kabupaten Bandung, pendekatan penelitian dengan *action research* menemukan bahwa advokasi program pemberdayaan perempuan keluarga miskin berupa perencanaan, pelaksanaan, dan penyempurnaan program kurang mendapat dukungan berupa legalitas formal dari pemerintah desa, sehingga membutuhkan advokasi program melalui audiensi dan publik *hearing*, *lobbying* serta jejaring dengan pihak sponsor dan media massa lokal. Dengan pendampingan tersebut, program pemberdayaan perempuan keluarga miskin dapat dilaksanakan dan menjadi model dalam pemberdayaan perempuan pada kelompok lainnya.

Kajian yang lain dilakukan oleh Kiromim Baroroh (Baroroh, 2009:1-20) yang menganalisis Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan *Life Skill* (Studi Kasus Di Lembaga Advokasi Pendidikan Yogyakarta), menemukan bahwa peran LAPY sebagai fasilitator dan

motivator dalam memberdayakan perekonomian perempuan melalui *life skill* dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan memberikan hasil yang baik.

Hal ini terjadi karena adanya kerja sama antara pengurus LSM dan masyarakat sasaran, serta adanya pihak ketiga yang bersedia memberikan bantuan modal. Namun ada beberapa kendala yang dialami yaitu kurangnya kesadaran dan kemauan untuk menerapkan pengetahuan tentang kewirausahaan, keterbatasan modal untuk meningkatkan penguasaan teknologi, kurangnya kemampuan untuk memanfaatkan dunia usaha karena keraguan UKM untuk meningkatkan usaha, dan kurangnya akses terhadap sumber teknologi dan pengetahuan, serta kurangnya relawan yang bersedia melakukan pendampingan secara berkesinambungan.

Di negara berkembang, banyak lembaga donor seperti: *USAID (Agency for International Development)*, *JICA (Japan International Cooperation Agency)*, *African Women's Development Fund*, *The Ford Foundation*, *Action Aid International*, *OSI (Open Society Institute)*, *Oxfam* dan lainnya serta LSM seperti Infid, Institute Kapal Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia, *WEDO (Women's Environment Development Organization)* serta yang lain, melakukan advokasi sebagai jalan menuju perubahan sosial yang lebih efektif dan strategis.

Berbagai isu mereka tawarkan untuk dilakukan pendampingan seperti mempromosikan hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia, pengurangan angka kematian ibu, mencapai akses universal ke layanan kesehatan reproduksi, dan meningkatkan tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan formal, pekerjaan berbayar dan peran gender dalam partisipasi politik, serta wacana wacana

alternatif yang melihat ketidakadilan gender sebagai masalah keadilan sosial (Wilkins, 2014a:57-62).

Advokasi adalah aksi strategis yang ditujukan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang diperkirakan merugikan masyarakat. Pendapat menyatakan (Cangara, 2020:375-378) bahwa Advokasi dimaksudkan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan, baik oleh perorangan maupun kelompok masyarakat dengan memasukkan masalah dalam agenda kebijakan, dan mengontrol para pengambil keputusan untuk mengupayakan solusi, sekaligus membangun basis dukungan bagi penegakan dan penerapan kebijakan publik yang di buat untuk mengatasi masalah tersebut (Cangara, 2020:375-378).

Dalam hubungan dengan konsepsi Komunikasi Advokasi, *Center for Communication Programs (CCP) Johns Hopkins University – USA* pada tahun 1988 dalam Program Informasi Kependudukan yang didanai oleh USAID (*US Agency for International Development*). Memperkenalkan model Komunikasi Advokasi CCP ini bergerak dalam bidang komunikasi strategis untuk kesehatan masyarakat, terutama dalam membangun dan menerapkan konsep dan teknologi baru untuk mengevaluasi kaitan antara promosi dan advokasi kesehatan dengan perubahan perilaku. Tapi tidak berarti model ini tidak bisa diaplikasikan untuk bidang lain, seperti usaha untuk membangun kapasitas komunikasi strategis pada lembaga pemerintah maupun swasta di tingkat lokal dan nasional.

Model komunikasi untuk advokasi ini telah dilakukan di beberapa negara, antara lain : Bangladesh, Bolivia, Ecuador, Indonesia, Yordania, dan Kenya. Di

Bangladesh dilakukan program advokasi pendekatan strategis untuk pengembangan KIE keluarga berencana dan kesehatan ibu dengan melibatkan lebih dari 40 stakeholder baik pemerintah maupun swasta dengan membentuk pusat-pusat kesehatan “*one-stop shopping*”, di Bolivia dikembangkan program advokasi kesehatan reproduksi dengan membentuk 45 orang anggota panitia teknis KIE. Kelompok ini berhasil mempengaruhi Wakil Presiden dan Menteri Kesehatan Bolivia untuk berbicara di TV guna mempromosikan kesehatan reproduksi. Hasilnya pemerintah dan partai politik di Bolivia mendukung program pelayanan kesehatan reproduksi secara nasional dimana sebelumnya sangat susah dilakukan (Cangara, 2020:375-378).

Di Indonesia, program advokasi dilakukan dengan kerjasama sektor Publik dan Swasta untuk meluncurkan program KIE Nasional KB perkotaan. Program ini mencapai puncaknya dengan memperkenalkan KB Lingkaran Biru sebagai salah satu bentuk upaya swastanisasi pelayanan KB terbesar di dunia.

Program kegiatan advokasi yang dilakukan diberbagai negara menunjukkan bahwa peran komunikasi advokasi dalam pendampingan program sangat penting dan memberi dampak yang signifikan. Pendampingan program di dalam masyarakat memiliki banyak tantangan apalagi yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender dan hak hak masyarakat. Benturan latar belakang budaya, kondisi masyarakat, serta kebijakan pemerintah adalah suatu hal yang cukup menguras waktu dan energi dalam melaksanakan kegiatan advokasi.

Persoalan yang hampir sama di setiap negara adalah bagaimana menyambungkan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah yang

seringkali tidak berpihak pada penyelesaian masalah bahkan menambah masalah. Komunikasi yang intensif dan memiliki nilai tawar sangat dibutuhkan untuk menyeleraskan antara kondisi masyarakat yang harus diberikan arah dengan kebijakan pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pendampingan yang tepat dengan program yang familiar serta didukung kemampuan komunikasi advokasi yang baik akan dapat memberikan dampak yang signifikan serta dukungan timbal balik dari masyarakat dan pemerintah untuk pelaksanaan program pembangunan.

2. Pendekatan Teoritis

2.2.1 Teori Persuasif

Salah satu bentuk komunikasi paling mendasar adalah persuasi. Selama manusia berkomunikasi, persuasi akan memainkan peran sentral dalam kehidupannya. Persuasi ada di mana-mana, memainkan peran penting dalam politik, agama, psikoterapi, pendidikan, dan interaksi sosial sehari-hari (Petty & Briñol, 2008:137-144).

Persuasi adalah komunikasi manusia yang dirancang untuk memengaruhi penilaian dan tindakan otonom orang lain (Simons & Jones, 2011:3-19), memodifikasi keyakinan, nilai, atau sikap dan merubah sikap akibat paparan orang lain (Olson dan Zanna dalam(Severin & Tankard, 2014:177-209).

Suatu bentuk pengaruh yang dicoba dalam arti bahwa ia berusaha mengubah cara orang lain berpikir, merasakan, atau bertindak, tetapi itu berbeda dari bentuk-bentuk pengaruh lainnya. Bukan tangan besi penyiksaan, tongkat, atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya. Persuasi merupakan sebuah praktek untuk

mengubah atau mempengaruhi cara berfikir seseorang, komunitas bahkan masyarakat untuk kearah yang diinginkan.

Persuasi biasanya didefinisikan sebagai komunikasi manusia dirancang untuk memengaruhi orang lain dengan. O'keefe (O'keefe, 2015:29-40) berpendapat bahwa ada persyaratan bagi pengirim, sarana, dan penerima untuk mempertimbangkan sesuatu yang persuasif.

Pertama, persuasi melibatkan tujuan dan niat untuk mencapai tujuan itu di pihak pengirim pesan. Kedua, komunikasi adalah sarana untuk mencapai tujuan itu. Ketiga, penerima pesan harus memiliki kehendak bebas oleh karenanya, persuasi bukanlah kebetulan, juga bukan pemaksaan. Secara inheren komunikasi. Walaupun secara umum diyakini bahwa tindakan mempengaruhi adalah merupakan bagian utama dalam persuasi tetapi hal yang menjadi tujuannya adalah sebuah literasi sikap terhadap individu.

Mempelajari dan mendalami sikap dan perilaku individu akan memberikan banyak masukan dan pemahaman mengenai apa yang akan dilakukan demi suatu perubahan yang diinginkan. Sangat tidak mudah memberi pengaruh kepada individu individu yang memiliki latar belakang sosial budaya dan keyakinan yang kuat, kemudian ingin melakukan perubahan yang signifikan dalam proses kehidupannya. Hal ini harus didukung dengan kemampuan komunikasi yang baik.

Berdasarkan kondisi yang ada baik secara individu , komunitas maupun masyarakat maka ada enam dimensi persuasi yang terjadi yaitu:

1. *Pertama* adalah keintiman. situasi yang sangat intim adalah situasi di mana sumber memiliki hubungan pribadi yang sangat bermakna dan mungkin intim dengan penerima.
2. *Kedua* adalah dominasi. ini melibatkan satu orang dalam situasi persuasi biasanya dominan dan orang lain biasanya tunduk; satu orang pada dasarnya mengendalikan perilaku yang lain.
3. *Ketiga* adalah resistensi. situasi bervariasi dalam hal seberapa menyenangkan si penerima terhadap objek persuasi.
4. *Keempat*, benar. melibatkan pembenaran yang dimiliki sumber untuk meminta penerima melakukan sesuatu. apakah sumber memiliki alasan yang masuk akal untuk permintaan tersebut.
5. *Kelima* adalah manfaat pribadi. Dimensi ini mencakup apa yang akan diperoleh sumber dengan berhasil dalam upaya persuasi dan mungkin juga mencerminkan keuntungan bagi penerima dalam memenuhi harapan sumber daya.
6. *Keenam* adalah konsekuensi jangka panjang. situasi bervariasi dalam hal apakah persuasi akan memiliki konsekuensi jangka pendek atau jangka panjang untuk hubungan antara sumber dan penerima. Ketika hubungan tersebut bersifat intim, upaya persuasi dapat memiliki konsekuensi jangka panjang. Namun, persuasi antara orang asing biasanya hanya akan memiliki konsekuensi hubungan jangka pendek (Infante, 1993:1-40).

Dalam proses persuasi dikenal model pemrosesan informasi yang dikembangkan oleh McGuire (Severin & Tankard, 2014:83-102), perubahan sikap dan perilaku akan terjadi sebagai respons terhadap komunikasi persuasif. Pesan

persuasif harus dikomunikasikan sebagai sebuah agenda yang menjadi bahasan dengan masyarakat sasaran atau penerima. Penerima akan memerhatikan dan memahami pesan dengan selektif dan sangat tergantung pada kebutuhan mereka sehingga dapat mempengaruhi dan meyakinkan mereka berdasarkan argumen yang disajikan. Kesemuanya ini akan melahirkan pengadopsi baru dan memunculkan perilaku yang diinginkan.

Menurut Demirdogen (Demirdögen, 2010:189-201), dalam komunikasi persuasif, diketahui ada tiga fungsi utama menurut yaitu: *control function* atau fungsi pengawasan; pengawasan, dimana komunikasi persuasif dijadikan alat untuk mengkonstruksi pesan dan membangun citra diri (*image*) agar dapat mempengaruhi orang lain.

Dalam konteks ini, berbagai kepentingan dapat diraih, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan organisasi dan masyarakat. *Consumer protection function* atau fungsi perlindungan konsumen; Fungsi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu,

1. Pertama, menguji pesan dengan cara mengkajinya dengan para ahli yang dapat dipercaya.
2. Kedua, melakukan analisis secara kritis, melalui metode penelitian komunikasi tentang kebenaran dari pesan yang diterima.
3. Ketiga, yaitu *Knowledge function* atau fungsi pengetahuan. Fungsi lebih menekankan pada tingkat wawasan tentang peranan persuasi dalam masyarakat dan dinamika psikologi persuasi yang berkembang.

Peranan persuasi dalam masyarakat adalah menelaah tentang keterkaitan antara individu dengan pengaruh yang dibentuk oleh individu yang lain, kelompok dan organisasi, serta lembaga tempat individu tersebut bergabung. Selain itu, pengaruh kolektivitas atas individu yang ditimbulkan kaitannya dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Oleh karena itu, melalui komunikasi persuasif akan ditemukan solusi dan cara pemecahan masalah. Melalui pengkajian dinamika persuasif, akan diperoleh pengertian tentang cara manusia mengikuti rangsangan, menata lingkungan, dan pikiran-pikiran mereka berinteraksi. Bertolak dari ketiga fungsi komunikasi persuasif tersebut, Simons menjelaskan bahwa kemampuan menyaring pesan persuasif membutuhkan ketekunan dalam mempelajari teknik persuasi yang dilakukan orang lain dalam membujuk kita. Kemampuan dalam komunikasi persuasi membutuhkan antisipasi terhadap kecenderungan-kecenderungan reaksi audiens. Selain itu, diperlukan pula pengertian dan pemahaman tentang sifat dasar proses persuasi yang terjadi di masyarakat. Selain itu Karakteristik persuasif ini dapat dinyatakan sebagai (a) sumber komunikasi persuasif, (b) karakteristik pesan, (c) karakteristik penerima dan konteks pesan.

Pendekatan teori persuasi ini diharapkan mampu menjawab proses awal pelaksanaan komunikasi advokasi sekolah perempuan terutama kepada mereka yang kurang tingkat pendidikannya, tidak mampu beradaptasi dan lainnya. Peserta sekolah perempuan yang didominasi oleh masyarakat miskin dan kurang mendapatkan informasi serta sangat kuat dengan budaya patriarkhi bisa dikatakan

sangat sulit menerima sebuah hal yang baru dan cenderung akan bersifat antipati terhadap perubahan.

2.2.2 Teori Komunikasi Feminis

Salah satu kajian menarik di era ini adalah kajian kajian yang berkaitan dengan feminis. Perkembangan kajian feminis dikenal dalam tiga gelombang dan memiliki ciri dan karakter masing masing (Arivia dalam (Lubis, 2015:94-121).

Gelombang pertama berkisar pada penuntutan terhadap pemberian hak suara bagi perempuan serta perjuangan hak-hak sipil. Gelombang kedua berorientasi pada perjuangan akses perempuan ke lapangan kerja, perjuangan memperoleh pendidikan, yang fokusnya pada *egalitarianisme* (kesetaraan) dan transformasi secara radikal dalam kehidupan dan menciptakan dunia yang “*terfeminiskan*”.

Gelombang ketiga adalah gelombang yang sanga kuat karena banyak dipengaruhi oleh teori kritis (*critical theory*) seperti postmodernisme, dan post-strukturalisme. Fokus gelombang ketiga sudah agak longgar dan banyak bersinggungan dengan pemikiran tentang politik perbedaan, *the other*, lokalitas dan lainnya (Lubis, 2015:94-121).

Karakteristik ilmu pengetahuan dengan fokus kajian dan penelitian mengenai perempuan memiliki beberapa perspektif antara lain; adanya pembelaan atas nilai nilai perempuan serta berperspektif perempuan (seperti advokasi, dan posisi nilai perempuan), penolakan terhadap asumsi seksime dalam pertanyaan penelitian, menciptakan sensitivitas relasi gender, pengalaman peneliti dalam proses penelitian, dapat mengelola dimensi emosi dan interpretasi, memfasilitasi

perubahan personal dan masyarakat sehingga berorientasi praxis, bertujuan emansipatoris, menampilkan keragaman, dan mengembangkan hubungan khusus dengan orang-orang yang diteliti.

Dalam studi komunikasi, Hanno Hardt (Hardt, 1992:45-110) mengemukakan bahwa pendekatan teori feminis merupakan perspektif alternatif yang kuat dan signifikan terutama dalam mengkaji kehidupan sosial kaum perempuan yang di dalamnya menyangkut cara berperilaku, cara berfikir, dan cara merasa dalam berbagai hal yang tidak tampak dipermukaan. Dominasi kekuatan patriarkal dalam ruang publik maupun ruang privat cukup besar. Ruang publik dianggap oleh kaum pria sebagai ruang kebebasan, dan ekspresi kesuksesan sementara kaum perempuan menjadi tempat untuk ajang eksploitasi dan pelecehan.

Teori feminis dalam bidang komunikasi mencakup banyak bidang penyelidikan, tetapi berbagi penekanan umum pada pemeriksaan dan penjelasan gender dan kekuatan gender dalam teks-teks komunikatif. Teori-teori ini menjelaskan tampilan kekuasaan, yang menunjukkan pola wacana terhubung ke hubungan kekuasaan secara lebih umum, atau menawarkan penjelasan tentang strategi yang mungkin untuk pengurangan kekuatan gender. Banyak cendekiawan, seperti Dow dan Condit (Cuklanz, 2016:1-11) menegaskan bahwa untuk dianggap feminis, teori harus difokuskan pada kontribusi pada tujuan keadilan gender.

Teori feminis dalam komunikasi harus menjelaskan tidak hanya interaksi yang saling mempengaruhi antara gender dan kekuasaan, tetapi juga relevansi elemen-elemen tekstual lainnya termasuk ras, seksualitas, dan kelas. Ketidakseimbangan kekuatan gender dipahami sebagai keterkaitan dengan

hubungan kekuasaan kelas, ras, seksualitas, dan kategori lainnya termasuk agama dan etnis dan teori komunikasi feminis yang modern harus berusaha mempertimbangkan berbagai elemen ini.

Teori komunikasi feminis dapat dibedakan dari teori lain berdasarkan tiga kriteria yaitu komunikasi feminis berteoris tentang gender, komunikasi dan perubahan sosial. Tiga kriteria harus memperjelas kajian komunikasi tentang perempuan dan gender dengan mendefinisikan gender atau mengoperasionalkannya, sehingga mereproduksi hal yang jelas.

Teori komunikasi feminis, dimulai dengan tujuan memahami dan menjelaskan gender, menolak untuk menerima jawaban mentah dan asumsi akal sehat yang tidak tertandingi. Asumsi komunikasi dalam memahami gender dimulai asumsi bahwa dibutuhkan perubahan struktural yang mendalam untuk menghasilkan hubungan sosial yang baru dan itu dilakukan dalam masyarakat (Cuklanz, 2016:1-11).

Pengembangan Teori komunikasi feminis oleh Lana F. Rakow dan Laura A. Wackwitz (F. & Wackwitz, 2004:2-10) dibagi ke dalam tiga tema yaitu perbedaan (*differen*), yang mengacu pada konsep linguistik, material dan politik tertentu yang terbangun di antara kelompok ras dan etnis, jenis kelamin, seksualitas, kelas ekonomi, dan orientasi politik. "*Perbedaan*" mengeksplorasi asumsi dasar-dasar politik dan filosofis serta konsekuensi dari perbedaan (a) antara gender dan (b) di antara perempuan, yang membangun asumsi mengenai cara memahami makna "*perempuan*".

Kedua adalah suara (*voice*) yakni ekspresi dan pendapat kaum dalam ruang domestik dan publik. Hal ini akan menjadi sebuah kehormatan bagi mereka jika mampu di dengar sebagai representasi dirinya dalam forum forum komunikatif (interpersonal, kelompok, organisasi).

Ketiga adalah keterwakilan (*representatif*). Sistem perwakilan adalah bagaimana dalam budaya populer, media dan forum sosial, politik, dan intelektual lainnya keberadaan kaum perempuan semakin dihargai dan dihormati. Sistem representasi ini tidak hanya mengeksplorasi konsekuensi-konsekuensi politis dan material tetapi berupaya menempatkan wakil kelompok atau posisi kaum perempuan untuk sebagai sebuah representasi terhadap permasalahan maupun solusi yang ingin dicapai.

2.2.3 Teori Pemberdayaan

Secara harfiah pemberdayaan adalah upaya mengendalikan kehidupan seseorang (Panda et al., 2003:21-44) untuk membangun kontrol atas sumber daya dalam pengambilan keputusan dan implementasinya (Khan & Ara, 2006:74-92), dengan memberikan otoritas atau kekuasaan kepada yang tidak berdaya dalam situasi tertentu (Dutta, 2014:4-9).

Sementara itu, pemahaman ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat kalangan yang tidak memiliki daya dalam menjalani proses kehidupannya dalam berbagai bidang. Mereka tidak memiliki hak-hak independen dalam mengatur dirinya serta tidak mampu membuat pilihan-pilihan dalam mengendalikan sumber dayanya ketika orang diberi kesempatan untuk mengendalikan hidup mereka dan diizinkan untuk membuat keputusan sendiri, dan

kondisi ini dapat meningkatkan kesejahteraan dalam keluarga dan masyarakat maka inilah makna terpenting dari pemberdayaan.

Pemberdayaan dioperasionalkan dengan menjangkau yang paling tertindas, melatih yang tertindas dan terlibat dengan mereka dalam dialog, dan dengan menjadi fasilitator dalam proses perubahan (Chitnis, 2005:82-104). Pemberdayaan merupakan proses, yang bertahap, terus berjalan dan berkesinambungan.

Dalam kegiatan pemberdayaan ada empat hal yang perlu mendapatkan perhatian yaitu : (a) Pemberdayaan adalah kontekstual, dan oleh karena itu kontrol terlihat berbeda untuk situasi, budaya, dan identitas yang berbeda; (b) pemberdayaan adalah proses perkembangan; (c) pemberdayaan adalah suatu proses dan hasil; dan (d) praktik pemberdayaan melibatkan hubungan yang merangkul kebersamaan, membangun kekuatan, dan mengakui keberagaman dengan budaya rendah hati (Francis East & Roll, 2015:1-8).

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai model pembangunan berakar kerakyatan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat kita yang masih terperangkap pada kemiskinan dan keterbelakangan (Noor, 2011:87-99)

Menurut Ife (Ife & Tesoriero, 2008:285-308) pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan dan hal itu dapat dicapai dengan menggunakan strategi yakni mengembangkan dan mengubah struktur dan lembaga, aksi sosial dan politik dan pendidikan dan penyadartahuan. Ketiga strategi ini dilakukan untuk mewujudkan keadilan terhadap masyarakat terutama pada

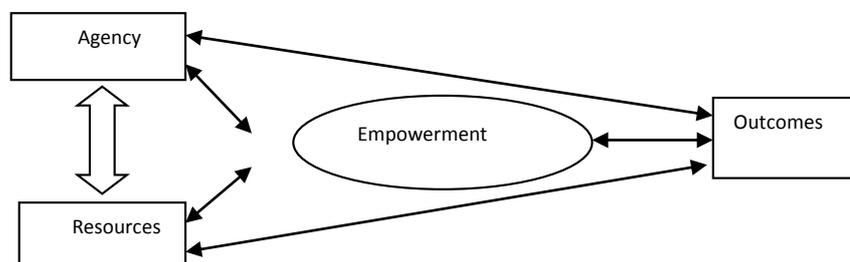
layanan dan kesempatan untuk berpartisipasi. Pemberdayaan juga membutuhkan kekuatan dan aksi kolektif untuk perubahan dan harus ditunjang dengan proses pendidikan dalam memahami gagasan untuk menuju perubahan yang dicita citakan.

Teori pemberdayaan, yang tertanam dalam model praktik kerja sosial, mengkontekstualisasikan masalah manusia dalam konteks sosial politik dengan penekanan pada masyarakat yang terpinggirkan. Mengingat penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan komunikasi advokasi sekolah perempuan, maka teori pemberdayaan yang akan dijadikan acuan adalah pemberdayaan perempuan. Pengertian pemberdayaan perempuan dimaksudkan sebagai proses yang memberi mereka kendali atas kekuasaan dan sumber daya, dan mengubah kehidupan perempuan dari waktu ke waktu melalui partisipasi aktifnya dalam proses tersebut (Laizu et al., 2010:217-230).

Pemberdayaan adalah bantuan untuk membantu perempuan mencapai kesetaraan dengan laki-laki atau, paling tidak, untuk mengurangi kesenjangan gender secara signifikan (Kadam, 2012: 1-3). Tanpa pemberdayaan maka peran sosial tertentu tidak dapat dilakukan. Perempuan memainkan peran yang berbeda dalam segala aspek kehidupan, karena dia adalah kepala arsitek keluarga, guru pertama memainkan peran utama dalam menciptakan masyarakat yang beradab.

Ada berbagai cara untuk dapat memberdayakan perempuan. Perorangan dan pemerintah harus bersatu untuk mewujudkannya. Pendidikan untuk anak perempuan harus diwajibkan agar perempuan dapat menjadi buta huruf untuk mencari nafkah bagi diri mereka sendiri. Perempuan harus diberi kesempatan yang sama di setiap bidang, terlepas dari gender (Bhosle et al., 2020:142-147)

Secara umum, dua faktor utama dalam proses pemberdayaan diidentifikasi: kontrol atas sumber daya (kondisi untuk pemberdayaan); dan agensi (kemampuan untuk merumuskan pilihan). Dari kerangka kerja konseptual yang dibahas oleh Malhotra (Laizu et al., 2010:220-221), dapat dipahami bahwa pemberdayaan adalah proses dinamis yang dapat dipisahkan menjadi komponen, seperti sumber daya yang memungkinkan, agensi dan hasil.



Gambar 6 . Hubungan Antar Sumberdaya, Agensi, dan Hasil Dalam Pemberdayaan

Kerangka kerja konsolidasi yang dikembangkan oleh Chen (Laizu et al., 2010:222-224) merinci empat jalur luas di mana pengalaman individu berubah yaitu:

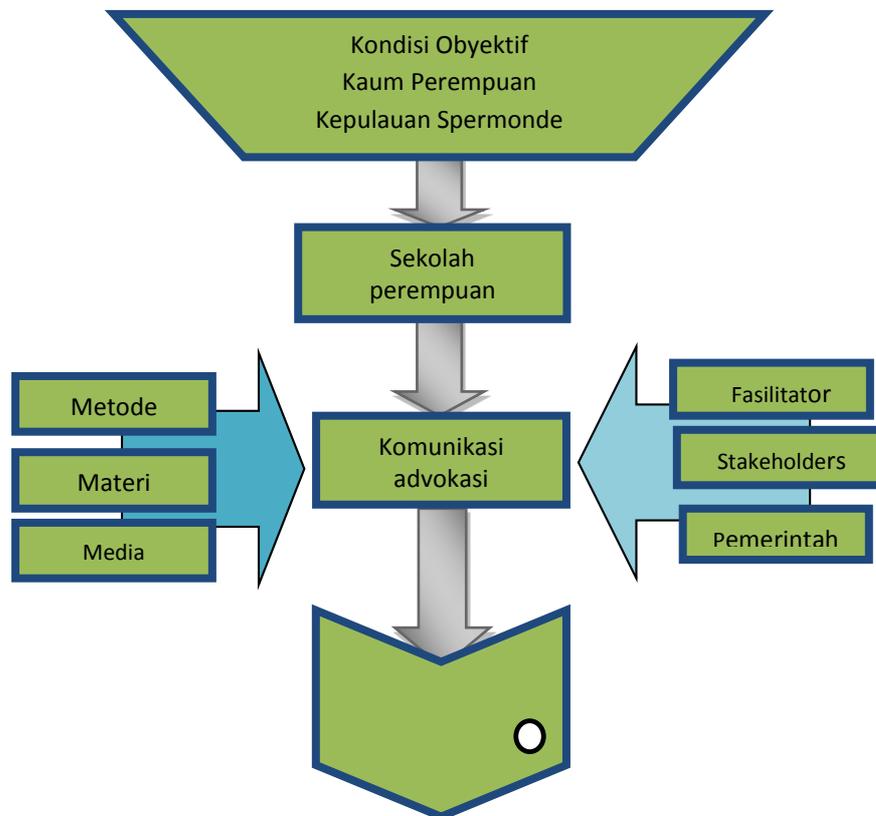
1. *Jalur material*, yang melaluinya perubahan akses atau kontrol terhadap sumber daya material, seperti tingkat pendapatan, kepuasan kebutuhan dasar atau kapasitas penghasilan, dialami.
2. *Jalur kognitif*, melalui mana perubahan tingkat pengetahuan, keterampilan atau kesadaran lingkungan yang lebih luas dialami.
3. *Jalur perseptual*, yang melaluinya perubahan tingkat kepercayaan individu dan harga diri serta visi masa depan serta perubahan dalam pengakuan dan rasa hormat oleh orang lain dialami.

4. *Jalur relasional*, di mana perubahan dalam peran pengambilan keputusan, daya tawar, partisipasi dalam kelompok non-keluarga, ketergantungan pada orang lain dan mobilitas dialami.

2.3 Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini, peneliti membagi empat bagian yang menjadi acuan penelitian yaitu:

- 1) *Input*: Sekolah perempuan dilaksanakan berdasarkan kajian lembaga swadaya masyarakat atas pertimbangan kondisi geografis, demografis, keadaan masyarakat khususnya kaum perempuan (sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan).
- 2) *Process*: proses komunikasi advokasi yang dilakukan fasilitator, dengan dukungan *stakeholders* dan pemerintah untuk merekrut peserta sekolah perempuan dengan metode persuasif, materi pendidikan adil gender serta penggunaan media tradisional, media sosial dan media massa .
- 3) *Output*: peserta sekolah perempuan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hak hak perempuan di segala bidang (kesejahteraan).
- 4) *Impact* : penerimaan kaum perempuan khususnya di kepulauan spermonde di segala bentuk kegiatan pembangunan, diruang publik, dan pengembangan kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan perempuan dan menjadi agen perubahan baru bagi masyarakat.



GAMBAR 7 KERANGKA KONSEP

2.4 Asumsi – Asumsi Dasar

1. Sekolah perempuan memiliki ini kelola yang sudah berjalan dengan baik dalam mengembangkan potensi keterampilan kaum perempuan di kepulauan Spermonde.
2. Proses komunikasi advokasi yang dilakukan pada sekolah perempuan berbasis pada potensi lokal yang tersedia di Kepulauan Spermonde.
3. Sekolah Perempuan menghadapi sejumlah tantangan dalam proses pelaksanaan Komunikasi advokasi di Kepulauan Spermonde.
4. Sejumlah capaian yang berhasil diraih Sekolah Perempuan dalam proses Komunikasi Advokasi. Dampaknya terutama dalam memenuhi kebutuhan kaum perempuan Pulau Spermonde.